

## SBY-JK Bakal Jadi Pemimpin Tak Disukai

JAKARTA, BK

Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengalami penurunan tajam. Bila ketidakpuasan publik ini terus memburuk dan menembus psikopolitik (50%), duet SBY-JK bakal jadi pemimpin yang tidak disu-

kai publik.

Dalam kajian akhir tahunnya, Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyebutkan, sumber utama penurunan tingkat kepuasan publik itu adalah di sektor ekonomi. Dalam paparannya yang disampaikan Anis Baswedan, salah seorang peneliti LSI, di

KE HAL 11 KOL 1

Jakarta, Kamis (29/12), berdasarkan survei opini publik nasional yang dilakukan terhadap 1.109 responden di 33 provinsi, mayoritas publik (53%) menilai kondisi ekonomi saat ini lebih buruk dibanding satu tahun lalu. Kenaikan harga BBM merupakan faktor dominan yang dikeluhkan publik, yang menunjukkan bahwa pemerintah gagal meringankan beban masyarakat.

Dalam proyeksinya, apabila ketidakpuasan publik atas kinerja ekonomi pemerintah terus memburuk, maka batas psikopolitik (50%) kemungkinan akan tertembus dan duet Yudhoyono-Kalla bakal jadi pemimpin yang tidak disukai publik.

Berdasarkan survei LSI, yang memiliki tingkat kepercayaan 95% dan *margin error* 2,95% serta menggunakan metodologi *multi-stage random sampling* itu, sebanyak 56% responden menyatakan puas atas kinerja Presiden SBY dan

52% menyatakan kepuasannya terhadap kinerja Wapres Jusuf Kalla (JK). Angka tersebut, menurut Anis, telah berada di bawah angka *electoral* pasangan itu yang diperoleh dalam Pemilu 20 September 2004 lalu, yakni sekitar 61%.

"Angka ini bagi SBY adalah yang terendah, setelah ia dilantik sebagai presiden. Kepuasan publik atas kinerja SBY mencapai angka tertinggi (80%) ketika ia baru sekitar dua bulan menjadi presiden, padahal waktu itu ia belum banyak bekerja," katanya.

Kendati terjadi penurunan angka kepuasan publik terhadap kinerja SBY-JK, dalam survei LSI ternyata masih belum ada tokoh lain yang muncul dan mampu mengimbangi popularitas SBY apabila Pilpres dilaksanakan pada hari ini.

"SBY masih berpeluang memenangkan pemilu itu, namun penurunan tingkat kepuasan publik sudah menunjukkan tanda-tanda

yang mengkhawatirkan," ujar Anis.

Hasil survei juga menyebutkan bahwa mayoritas publik merasa kondisi ekonomi nasional mengalami kemunduran di banding setahun sebelumnya (tahun 2004). Tingkat optimisme publik pun menurun tajam dari bulan ke bulan sepanjang pemerintahan SBY-JK.

Terkait dengan hasil perombakan kabinet, kurang dari 50% responden berkeyakinan bahwa upaya perombakan kabinet mampu membuat pemerintahan menjadi lebih baik. Angka itu, menurut LSI, cukup mengkhawatirkan karena ketidakpercayaan bila dikombinasikan dengan menurunnya tingkat kepuasan terhadap pemerintahan SBY-JK, memperlihatkan bahwa publik merasa langkah-langkah kuratif presiden belum cukup efektif memperbaiki kinerja kabinetnya.

Menanggapi hasil survei LSI,

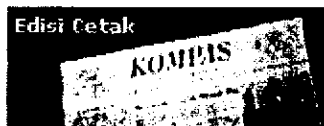
Juru Bicara Kepresidenan Andi Malarangeng berpendapat, tren naik-turun hasil survei dalam suatu negara yang demokratis merupakan hal yang sangat lazim terjadi.

"Memang biasa di negara-negara mana pun ketika ada kebijakan yang tidak populer maka hasil *pooling* bisa disimpulkan menurun, dan kondisi itu akan berubah jika ada kebijakan baru yang memihak rakyat. Itu adalah hal yang biasa," katanya.

Mengenai angka tingkat kepuasan publik terhadap kinerja presiden, namun untuk aspek lainnya yaitu di bidang hukum dan keamanan serta sosial hasil survei masih menunjukkan prosentasi yang tinggi. Namun, Andi optimis kinerja pemerintah dalam memerangi korupsi, terorisme, dan narkoba bisa menjadi jangkar untuk menutupi kekurangan di bidang ekonomi, walaupun kinerja ekonomi pada kuartal pertama dan kedua tahun 2006 ditargetkan harus ada perubahan yang lebih baik. Andi juga berharap *pooling*, yang merupakan bagian dari pengujian demokrasi, mampu memberikan data yang objektif yang berkembang di masyarakat.

Dikatakan, memang ada tren penurunan kepuasan publik atas kinerja presiden, namun untuk aspek lainnya yaitu di bidang hukum dan keamanan serta sosial hasil survei masih menunjukkan prosentasi yang tinggi. Namun, Andi optimis kinerja pemerintah dalam memerangi korupsi, terorisme, dan narkoba bisa menjadi jangkar untuk menutupi kekurangan di bidang ekonomi, walaupun kinerja ekonomi pada kuartal pertama dan kedua tahun 2006 ditargetkan harus ada perubahan yang lebih baik. Andi juga berharap *pooling*, yang merupakan bagian dari pengujian demokrasi, mampu memberikan data yang objektif yang berkembang di masyarakat.

"Itu merupakan *snap-shoot* yang alangkah baiknya dilakukan secara berkala, untuk mengetahui pola perilaku masyarakat sesungguhnya," katanya. © gus



Updated: Kamis, 16 Maret 2006, 16:02 WIB

[Ad Info](#) | [About](#)

**NAS**



Rubrik

Hiburan

Kesehatan

Metropolitan

Makan & Plesiran

Nasional

Olah Raga

Otomotif

Saham & Pasar Uang

Sains & Teknologi

Selular

Wanita

Komunitas

Pilih

Kolom

Pilih

Surat Kabar

Pilih

Majalah

Pilih

Radio

Pilih

CARI

## LSI: Tak Sedikit yang Setuju Nilai Islam Radikal

Laporan : Heru Margianto

Jakarta, KCM

Tidak sedikit, meski bukan mayoritas, masyarakat Indonesia yang setuju dan mendukung gagasan mengenai nilai-nilai Islam yang dipandang radikal. Seperti, perempuan tidak boleh menjadi pemimpin, orang mencuri harus dipotong tangan, dan orang berzinah harus dirajam.

Kesetujuan pada ide-ide yang bersumber pada syariah di Indonesia cukup tinggi. Akan tetapi, hal itu tidak tercermin dalam dukungan terhadap partai-partai politik yang memperjuangkan dilaksanakannya syariah Islam di Indonesia. Hal itu berarti, setuju, tidak sama dengan kemauan mendukung pelaksanaannya.

[Kirim Teman](#) | [Print Artikel](#)

### Berita Terkait:

- [Polisi Akan Hadapi Sweeping Liar](#)
- [Menag: Sweeping, Serahkan kepada Aparat](#)
- [FPI Kembali "Sweeping" Tempat Hiburan](#)



Demikian kesimpulan survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI)

tentang dukungan dan penolakan terhadap radikalisme Islam. Survei yang dilaksanakan pada 23-27 Januari 2006 ini mengambil 1.200 orang sebagai sampel. Mereka berasal dari 33 provinsi. Sampel itu dipilih secara proporsional.

Peneliti LSI Anis Baswedan yang merepresentasikan hasil penelitian kepada publik di Hotel Sari Pan Pacific, Kamis (16/3) mengatakan survei yang dilakukan ingin memotret seberapa banyak dan seberapa luas dukungan terhadap nilai-nilai Islam yang radikal tersebut.

"Radikalisme keagamaan ketika dipahami sebagai suatu paham untuk melakukan perubahan atau pergantian tatanan sosial politik yang ada dengan yang lain yang didasarkan atas pemahaman keagamaan tertentu dan diterjemahkan ke dalam norma dan hukum Islam punya dukungan cukup banyak dalam masyarakat Islam Indonesia. Meski, tidak mayoritas," kata Anis yang dalam kesempatan itu didampingi pula oleh sosiolog Universitas Indonesia (UI) Imam Prasojo dan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Amin Abdullah.

Namun demikian, menurut Anis, patut dicermati, satu dari sepuluh Muslim Indonesia mendukung cara-cara kekerasan demi agama. "Memang terlihat kecil. Tapi, cukup besar untuk dukungan terhadap ekstrem yang dilakukan Amrozi cs," kata Anis.

#### **Tidak dapat dibenarkan**

Sementara, di sisi lain, tujuh dari sepuluh orang Indonesia berpendapat, kekerasan terhadap sipil tidak dapat dibenarkan sama sekali apa pun alasannya. Hal ini makin menguatkan bahwa tindakan kekerasan itu bukanlah metode yang disukai dan didukung.

Lebih lanjut Anis mengungkapkan, dari survei itu diperoleh angka 48 responden setuju dengan hukum rajam bagi yang berbuat zinah. Lalu, 34 persen tidak setuju kalau perempuan menjadi presiden Indonesia.

Berikutnya, 40 persen responden mendukung poligami. Kemudian, 38 persen responden setuju hukum potong tangan bagi pencuri.

Selanjutnya, mayoritas responden (74,3 persen) tidak sependapat dengan bom bunuh diri dan bentuk kekerasan lain terhadap sipil demi membela Islam. Hanya 0,50 persen responden yang berpendapat kalau tindakan tersebut selalu dapat dibenarkan. Inilah yang dimaksud satu dari sepuluh Muslim Indonesia mendukung cara-cara kekerasan demi agama.

Terkait dengan itu 77,60 persen responden berpendapat hukuman mati terhadap Amrozi cs adalah adil. Sementara, 55,4 persen setuju dengan gagasan pengawasan terhadap pesantren untuk mencegah paham keislaman yang dijadikan alasan oleh seseorang melakukan tindakan kekerasan.

Menanggapi survei ini sosiolog Imam Prasojo mengatakan hasil survei ini tidak bisa serta merta dinyatakan sebagai sikap yang didasari oleh paham keagamaan. Menurut dia, patut digali lebih jauh seberapa besar pilihan sikap ini dipengaruhi respons dari kondisi eksternal.

"Misalnya, setuju dengan potong tangan terhadap pencuri, ini representasi atas dasar keyakinan agama atau jangan-jangan karena kesal banyaknya koruptor di Indonesia," katanya.

Selain itu, Imam berpendapat sulit mengukur sebuah sikap sebagai sesuatu yang radikal hanya dari jawaban setuju atau tidak setuju. Alasannya, apa yang disebut sebagai radikal sulit diukur parameternya.

"Tergantung dari sudut mana kita melihatnya. Suatu sikap disebut radikal, pasti jika melihatnya dari sudut sebarangnya. Sementara, dari sudut sebarang, mereka yang berada di sudut lain juga pasti disebut radikal," kata Imam.

Maka dari itulah, menurut Imam, daripada memberi label radikal kepada sekelompok orang, lebih baik memahami kenapa mereka melakukan hal-hal itu.

Pada bagian selanjutnya, Amin Abdullah mengatakan survei menunjukkan mayoritas masyarakat sebenarnya tidak sependapat dengan gagasan-gagasan radikal itu. Masyarakat dimaksud adalah "silent majority". "The silent majority ini masih banyak. Itu potensi untuk mengembangkan peradaban di Indonesia," demikian Amin Abdullah.

Penulis: Prim

**Berita Lain:**

16/03/2006, 14:56 wib

• [Unjuk Rasa di Abepura Tewaskan Seorang Polisi](#)

16/03/2006, 14:27 wib

• [Presiden Tidak Bahas soal Amnesti Anggota KPU](#)

16/03/2006, 14:23 wib

• [Aparat Keamanan Terus Lepaskan Tembakan Peringatan](#)

---

**Advertising on Internet?  
Web Building?  
Interactive Multimedia?**



---

**BACA HARI INI**

[Agenda Acara](#) - [Televisi](#) - [Bentara Budaya](#) - [Kata Mutiara](#)

[Saham & Pasar Uang](#) - [Hiburan](#) - [Kesehatan](#) - [Nasional](#) - [Metropolitan](#) - [Olah Raga](#) - [Sains & Teknologi](#)

**KOMUNITAS:** [Berita Duka](#) - [Feng Shui](#) - [Horoskop](#) - [Iklan Mini](#) - [Karier](#) - [Kata Mutiara](#) - [Kontak Jodoh](#) - [News By Email](#) - [Pasar Property](#) - [Seremonia](#) - [Surat Pembaca](#) - [Toko Buku](#) **KOLOM:** [Sarapan Pagi](#) - [Features](#) - [Berita Foto](#)

---

Dapatkan berita KCM melalui: [SMS](#) - [WAP/GPRS](#)

Tampilan terbaik dengan browser  
Design By [KCM](#) Copyright © PT. Kon

## Behind their professional performance

detikNews | detikFinance | detikFood | detikHot | detiki-Net | detikSport | Foto | Indeks

Info Iklan | SMSiklan | Sepakbola | Ticket Box | newsUpdate | detikShop | Surat dari Buncit

:: Lifestyle | Cupid | Jodoh | 123 X-Fun | Iguana | boleh | mobile tren | fun dering | makan yoo ::

SELEMBUT AIR MATA



**INSTO  
MOIST**

Melembabkan  
mata kering  
akibat lama di  
depan komputer



Hadir di  
14 cabang **BCA**

**JANGAN CUMA  
JADI PEMBACA**

Ingin nonton F1 di Inggris langsung !!  
Unduk 5 orang pemenang !!

## Survei LSI: 74,3% Responden Tak Setuju Bom Bunuh Diri

Arfi Bambani Amri - detikcom

Jakarta - Hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) terhadap 1.200 responden di 33 provinsi menemukan 74,30 persen responden tidak menyetujui bom bunuh diri dan bentuk kekerasan lain terhadap sasaran sipil dapat dibenarkan demi membela Islam dari musuh-musuhnya. Hanya 0,5 persen yang mengatakan selalu dapat dibenarkan.

Demikian laporan hasil survei LSI yang disampaikan oleh Anies Baswedan di Hotel Sari Pan Pacific, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Kamis (16/3/2006).

Sebanyak 8 persen responden memandang tindak pengeboman oleh Imam Samudera dan kawan-kawan dibolehkan sebagai bentuk perlawanan umat Islam terhadap Barat.

**PT. Berca Computel**

**D-Link**  
Building Networks for People

"D-Link Business Solutions"

Tuesday, 28 March 2006  
Time : 9.00am - 2.00pm  
Shangri-la Hotel Jakarta



DEPDIKNAS

Segala masukan Anda  
sangat kami hargai  
dan akan kami  
lakukan.

Segala masukan Anda  
sangat kami hargai  
dan akan kami  
lakukan.



**detikNews**

16/03/2006 17:31 WIB

Tagih Janji Penyelesaian  
Kasus Kekerasan, 7  
Warga Poso Datangi  
Komnas HAM

**detikNews**

16/03/2006 17:29 WIB

Panglima TNI: Insiden  
Uncen Cukup Ditangani  
Polri

**detikNews**

16/03/2006 17:27 WIB

Impunitas Ganjal  
Penegakan HAM

**detikNews**

16/03/2006 17:20 WIB

Buang Sial, Bupati  
Langkat Gelar Tepung  
Tawar untuk Raju

**detikNews**

16/03/2006 17:20 WIB

Depdagri: Perda  
Pelacuran Tangerang  
Dapat Dicabut

Selain itu 77,6 persen responden mengatakan putusan hukuman mati oleh pengadilan terhadap Imam Samudera, Amrozi dan Muklas adalah adil dan sangat adil.

Mengenai pandangan cara mengemukakan ketidaksetujuan terhadap AS, 42 persen responden tidak mendukung demonstrasi menentang AS dan 31 persen mendukung.

Survei juga menemukan 62 persen responden berpendapat kebudayaan Barat lebih banyak membawa keburukan bagi umat Islam di Indonesia.

Dikatakan Anies, 47,4 persen responden mengaku mengetahui adanya Front Pembela Islam (FPI), tiga kali lebih banyak daripada mengetahui Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang hanya mendapat 12,1 persen responden. Yang tertinggi adalah NU diketahui oleh 86 persen responden, Muhammadiyah 83,4 persen.

Sosiolog UI Imam B Prasodjo dalam kesempatan itu mengkritik metode yang digunakan dalam survei LSI tersebut.

Dalam temuan LSI yang mengatakan 62 persen responden bahwa kebudayaan Barat membawa keburukan, maka harus dijelaskan lebih lanjut mengenai kebudayaan seperti apa yang dimaksud.

Imam juga menanyakan definisi radikal dalam survei tersebut karena sebenarnya definisi radikal bersifat relatif.

Dia menyarankan perlunya dilakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk penelitian kualitatif karena banyak muncul pertanyaan baru. (san)

**Baca juga:**

- 3 Tersangka Bom Bali II Siap Dihukum Mati
- 3 Tersangka Bom Bali II Resmi Diserahkan ke Kejati Bali
- Ledakan Pura di Poso, 9 Saksi Diperiksa
- Berkas Rampung, 4 Tersangka Bom Bali II Akan Disidang

Informasi pemasangan webtorial/iklan

Hubungi bagian Iklan di [infoiklan@staff.detik.com](mailto:infoiklan@staff.detik.com)

Telepon 021-7941177 ext.526

## SMS Iklan

Jual rumah 2 lt luas 132m2 5 kmr tidur 3 kmr mandi mobil masuk garasi 1 saja langsung dgn yg punya daerah jatibening 1 antilop lepas rp. 375 jt bs (62811874948)

Lihat

Pasang

# Survey shows prevalent conservatism

Ridwan Max Sijabat  
The Jakarta Post/Jakarta

**I**slamic conservatism is a growing force to be reckoned with across the country, with research indicating about 40 percent of citizens would support the replacement of state laws with sharia and one in 10 consider suicide bombings justified in some circumstances.

A survey conducted in late January by the respected Indonesian Survey Institute (LSI) found 40 percent of respondents approved of adulterers being stoned to death, 34 percent did not want to see another female president and 40 percent accepted polygamy.

The survey also revealed that one in 10 people tolerate suicide bombing and other attacks on civilian targets in the name of Islam.

On a thief's hands being chopped off, 38 percent of respondents said the punishment fitted the crime.

The survey involved 2,000 respondents from different backgrounds nationwide.

In presenting the survey results Thursday, a senior researcher at the LSI, Anis Baswedan, said it was clear that certain Muslim groups had already embraced sharia as a value system as evidenced by their support for conservative organizations, such as the Islam Defenders Front

and the Indonesian Mujahidin Council.

Anis said, however, that despite the obvious support for conservative organizations, the majority of Muslims did not want to see the existing election system replaced, as was indicated by their mediocre results in the 2004 general election.

Yet most respondents saw eye to eye with the country's largest Muslim organizations — Nadhlatul Ulama and Muhammadiyah.

Anis said the strong support for conservatism and "radicalism" had much to do with what respondents called the negative influence of Western culture and the global injustice blamed on the United

States as a superpower representing the West.

Amin Abdullah, rector of Sunan Kalijaga State Islamic University in Yogyakarta, said he was not surprised by the survey results as conservatism had long flourished in the country but, despite strong conservatism, Muslims did not want to replace the existing state ideology with an Islamic one.

"The majority of Muslims have been moderate and accepted pluralism because Indonesia — as the most populous Muslim nation — lies far from the center of Islam, the Middle East, and this has made Islam in Indonesia rather different from that in Pakistan and Afghanistan," he said, adding that conservatism here had gotten stronger on the eve of the reform era in 1998.

Imam Prasodjo, a sociologist of the University of Indonesia, disagreed with the parameters the survey used to measure radicalism, saying they were relative.

"Women oppose polygamy, all communities dislike mixed marriages and all human beings are against terror acts," he said.

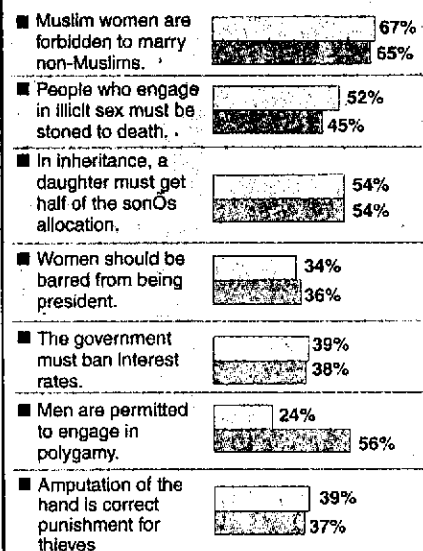
The two agreed that, despite the strong grip of conservatism, the "silent majority" supported the two largest Muslim organizations, which see themselves as tolerant of modern ways of thinking.

## Conservative viewpoint

Percentage of answers in agreement with the following questions

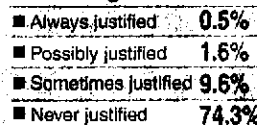
### On civil and criminal law

Based on gender of respondents  
☐ female ☒ male

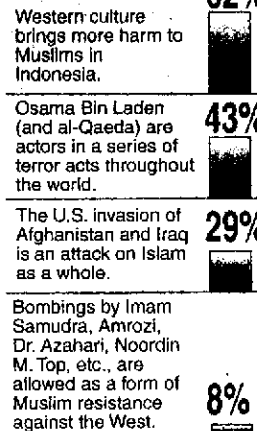


Source: Indonesian Survey Institute

### Concerning suicide bombings with civilian targets, in the name of defending Islam



### On terrorism and/or Islam-West ties



JPI/Ima R.D.

**SURVEI**

## **Dukungan Syariat Belum Tentu Cermin Ketakwaan**

JAKARTA, KOMPAS — Dukungan yang diberikan masyarakat terhadap pelaksanaan syariat Islam belum tentu merupakan refleksi dari tingkat ketakwaan dalam Islam. Dukungan tersebut lebih disebabkan faktor eksternal yang terjadi di masyarakat.

Hal ini disampaikan peneliti Lembaga Survei Indonesia (LSI), Anies Baswedan, ketika memaparkan hasil survei nasional LSI tentang Dukungan dan Penolakan Terhadap Radikalisme Islam di Jakarta, Kamis (16/3). "Penolakan dan penerimaan terhadap ide yang bersumber pada syariat itu tidak semata-mata merupakan cermin ketaatan pada agama, tetapi merupakan cermin faktor lainnya," ujarnya.

Anies menjelaskan, pandangan terhadap beberapa ide syariat memperlihatkan pola yang menarik. Pada tema yang tidak me-

nyangkut hubungan antara pria dan wanita, pandangan responden Muslim dan Muslimah Indonesia relatif sama. Tetapi dalam isu poligami, atau zina, terjadi perbedaan.

Sosiolog FISIP Universitas Indonesia, Imam Prasodjo, mengatakan, dari survei ini sulit mendapatkan jawaban apakah pandangan tersebut merupakan refleksi dari peningkatan ketakwaan atau reaksi atas kondisi eksternal.

"Apa yang ada di pikiran dan diungkapkan, belum tentu bisa dilakukan," ujar Imam Prasodjo.

Menurut Imam, ada bias peneliti dalam survei LSI itu, terutama terkait dengan radikal Islam. Misalnya, orang yang setuju dengan poligami dianggap radikal atau yang ingin merajam pezina dan memotong tangan pencuri itu radikal. (MAM)



SURVEI LSI

# Mujahidin Lebih Didukung daripada JIL

Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah masih di urutan teratas.

**JAKARTA** — Perjuangan kelompok Islam konservatif seperti Front Pembela Islam (FPI) dan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) ternyata mendapat tingkat persetujuan lebih tinggi dari masyarakat dibanding Jaringan Islam Liberal (JIL). Namun, tingkat kesetujuan tertinggi masyarakat diberikan kepada Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

Kesimpulan ini diperoleh dari hasil penelitian Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang diumumkan kemarin. Penelitian yang berlangsung pada 23-27 Januari lalu di 33 provinsi ini melibatkan 1.200 responden berusia minimal 17 tahun. Sampel akhir sebanyak

1.173 orang dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

"Ini menarik karena responden mendukung apa yang diperjuangkan, tapi ambivalen dengan tindakan yang dilakukan," kata Anies Baswedan, peneliti utama LSI, dalam dialog publik bertajuk "Dukungan dan Penolakan terhadap Radikalisme" di Jakarta kemarin.

Berdasarkan hasil survei, kata Anies, tingkat kesetujuan masyarakat terhadap Nahdlatul Ulama mencapai 71,7 persen, Majelis Ulama Indonesia 59,1 persen, Muhammadiyah 54,1 persen, FPI 16,9 persen, dan MMI 11 persen. Adapun Ahmadiyah dan Hizbut Tahrir masing-masing 3,9 persen dan 3,3 persen. Sedangkan Syiah 3,2 persen dan Jaringan Islam Liberal cuma 2,5 persen.

Menurut Anies, ketika radikalisme keagamaan diterjemahkan

ke dalam cara kekerasan, ternyata mendapat dukungan. "Ini harus mendapat perhatian dari pemerintah, agamawan, dan akademisi," katanya.

Menanggapi hasil penelitian ini, Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Amin Abdullah mengatakan, perlu ada penelitian tersendiri untuk memastikan besarnya dukungan terhadap radikalisme agama. Radikalisme di Indonesia, kata dia, disebabkan oleh faktor eksternal seperti ekonomi dan perebutan wilayah politik.

Adapun sosiolog Universitas Indonesia, Imam B. Prasodjo, mengatakan, penyebab radikalisme Islam memang harus dicari, apakah faktor eksternal atau memang persepsi keagamaan dari seseorang. "Setuju bukan berarti melakukan," katanya. ● RUDY PRASETYO

JUMAT, 17 Maret 2006

## SINAR HARAPAN

# Kelompok Islam Radikal Lebih Populer

Jakarta - Organisasi atau kelompok Islam yang cenderung konservatif atau radikal di Indonesia, seperti Front Pembela Islam (FPI) dan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), ternyata lebih populer dibanding kelompok Islam liberal seperti Jaringan Islam Liberal (JIL). Namun soal penerapan agenda radikal Islamis, sikap masyarakat Islam Indonesia terbelah.

Kesimpulan ini merupakan hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) terhadap 1.173 responden yang mereka wawancarai pada 23-27 Januari 2006.

"Radikalisme keagamaan jika dipahami sebagai paham yang melakukan perubahan atau pergantian tatanan sosial, hal itu memiliki dukungan yang cukup banyak dalam masyarakat, sekalipun tidak menjadi mayoritas," kata peneliti LSI, Anies Baswedan, dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (16/3).

Survei juga menyebutkan satu dari 10 muslim Indonesia menyetujui penggunaan kekerasan demi alasan membela agama.

Namun 7 dari 10 berpendapat, kekerasan terhadap sipil tidak dapat dibenarkan sama sekali, apapun alasannya. "Ini menunjukkan bahwa kekerasan bukanlah suatu metode yang disukai," kata Anies.

Sementara itu, soal penerapan Syariah Islam,

meski penerimaan terhadap ide-ide yang bersumber pada syariah di Indonesia cukup tinggi, namun hal itu tidak sama dengan keinginan untuk mendukung pelaksanaannya.

Penolakan atau penerimaan terhadap Syariah juga tidak semata-mata merupakan cerminan ketaatan terhadap agama, tetapi juga karena faktor lainnya.

Terhadap kebudayaan barat, enam dari 10 kaum muslim menganggap kebudayaan barat lebih banyak membawa keburukan bagi bangsa Indonesia.

Hal ini memang sejalan dengan kenyataan bahwa pandangan dan kelompok radikal lebih banyak disetujui umat Islam Indonesia dibandingkan dengan kelompok yang berpandangan liberal.

Menanggapi hasil survei tersebut, pengajar sosiologi Universitas Indonesia (UI) Imam Prasodjo mengatakan ada perbedaan yang cukup mendasar antara ungkapan verbal seseorang dengan apa yang termaktub dalam hatinya.

"Bisa jadi dia secara verbal mengatakan lain, tapi hatinya berbicara lain. Kita sepertinya masih sulit untuk menemukan jawaban yang sebenarnya dari hasil survei ini," katanya. Karena itu, baginya, perlu ada perbedaan antara setuju secara verbal dengan ide syariah dan setuju secara batiniah.

(inno jemabut)



Remember to put your clocks back this weekend

to an error

STUFF >> WORLD NEWS >> STORY

Friday, 17 March 2006

SEARCH  STUFF ☐ WEB ☐ **GO** HEADLINES ALERT

**NZ NEWSPAPERS**

**NATIONAL NEWS**

**WORLD NEWS**

World gallery

Videos

**SPORT**

MELBOURNE 2006

**BUSINESS**

**WEATHER**

**POLITICS**

**HEALTH**

**TECHNOLOGY**

**ENTERTAINMENT**

**ODDSTUFF**

**VIDEOS**

**RURAL**

**OPINION**

**TRAVEL**

**FOOD & WINE**

**MOTORING**

**CARTOON GALLERY**

**PHOTO GALLERIES**

**CROSSWORDS**

**HOROSCOPES**

**COMPETITIONS**

**NZ MAGAZINES**

**SUBSCRIPTIONS**

**YOUR SAY**

**MAKE STUFF MY HOME**

**ABOUT STUFF**

**FEEDBACK**

Place a Classified Ad  
www.edstuff.co.nz

**WORLD NEWS STORY**

# **One in 10 Indonesians back suicide bombings - survey**

17 March 2006

**RELATED LINKS**

- » Have your say
- » Subscribe to Archiviststuff

**JAKARTA:** Eleven per cent of the people in Indonesia, the world's most populous Muslim country, believe suicide attacks against civilian targets are sometimes justifiable, a survey said.

Though the number is relatively small, analysts say the findings of the Indonesian Survey Institute (LSI) are a wake-up call for Indonesian leaders and moderate clerics who fear a tiny radical Muslim fringe may be making inroads into the masses.

Suicide bombings using the flag of Islam have killed hundreds in recent years in Indonesia, a country whose population of 220 million population is around 85 per cent Muslim – most of them following a moderate form of the religion.

But the government has been working to weed out militant Islamic ideas since the discovery of videos last November showing the last words of suicide bombers who killed 20 people in restaurants on Bali island last year. Authorities and moderate clerics were shocked that young Indonesians could talk so blithely about the horrific bombings.

"Religious radicalism, when it is translated into violent methods in the name of religion, has received enough support – one in every 10 Muslims in Indonesia, LSI senior researcher Anies Baswedan said. "It seems small, but this is already quite big support for extreme acts."

The survey, based on 1,200 respondents across Indonesia's 33 provinces, showed 11.2 per cent believed suicide bombings were justifiable on occasion while 0.5 per cent said the method could always be justified to defend Islam from its

**MORE TOP**

- » Brockie lea for Sydney
- » Aussie spo of payoffs'
- » Canes whis
- » Flatmate to loveless se
- » Health boa Britain for
- » Posties fee Trade Me's
- » Risque NZ shirts steal

**Find a Job**

[jobstuff.co.nz](http://www.jobstuff.co.nz)

**Find a Property**

[www.propertystuff.co.nz](http://www.propertystuff.co.nz)

**Go Shopping!**

[www.stuffonsale.co.nz](http://www.stuffonsale.co.nz)

**Make a Match**

[www.personalstuff.co.nz](http://www.personalstuff.co.nz)

**Search Archives**

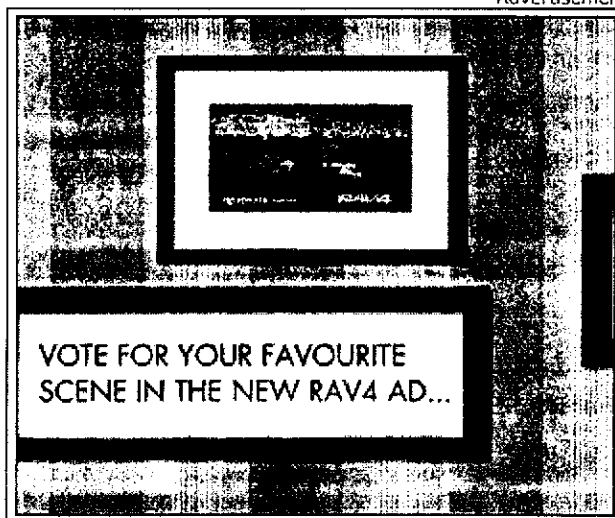
[www.archivestuff.co.nz](http://www.archivestuff.co.nz)

© Fairfax New Zealand Limited 2006. All the material on this page has the protection of international copyright. All rights reserved

enemies.

The survey also revealed that 8 per cent support masterminds of past suicide bombings, including Noordin M. Top, the most wanted terror suspect in Indonesia, who authorities say is an expert in recruiting young suicide bombers among the country's impoverished masses.

Police believe Top, a key operative of the al Qaeda-linked Jemaah Islamiyah militant network, is on the run in rural areas of Indonesia's main Java island.



Advertisement

Anti-terror campaigns in Indonesia have faced hurdles, including perceptions that the United States is out to attack Islam as well as the ample space given to militant voices and their sympathisers in the Indonesian media.

More recently, efforts to uproot radical Islam have been set back by anger over cartoons that lampooned the Prophet Mohammad, first published by a Danish newspaper.

Ads by Google

**Make a Difference**

Sponsor a child for \$18 a month through Children International.  
[www.children.org](http://www.children.org)

**Sponsor a Child**

A poor child in another country needs your help today. Sponsor.  
[www.PlanUSA.org](http://www.PlanUSA.org)

- » **PRINTABLE VERSION**
- » **SUBSCRIBE TO FREE HEADLINES**
- » **SUBSCRIBE TO ARCHIVESTUFF**

 **TOP OF PAGE**

**REUTERS** 

Great art.  
Just a 3 hr  
and 20 m  
from Auc

**Just Imagi**

Puzzles, Easy to do



The jewel c

**NZ Newspa**

Waikato Time  
Taranaki Dail  
Manawatu St  
The Dominion  
The Nelson M  
The Marlboro  
The Press  
The Timaru H  
The Southlan  
Sunday Star  
Sunday News

**Regional N**

Northland  
Auckland  
Central North  
Hawke's Bay  
West Coast  
Otago

**WORLD  
HEAD**

# One in 10 Indonesians back suicide bombings - survey

FRIDAY, 17 MARCH 2006

**JAKARTA: Eleven per cent of the people in Indonesia, the world's most populous Muslim country, believe suicide attacks against civilian targets are sometimes justifiable, a survey said.**

Though the number is relatively small, analysts say the findings of the Indonesian Survey Institute (LSI) are a wake-up call for Indonesian leaders and moderate clerics who fear a tiny radical Muslim fringe may be making inroads into the masses.

Suicide bombings using the flag of Islam have killed hundreds in recent years in Indonesia, a country whose population of 220 million population is around 85 per cent Muslim – most of them following a moderate form of the religion.

But the government has been working to weed out militant Islamic ideas since the discovery of videos last November showing the last words of suicide bombers who killed 20 people in restaurants on Bali island last year. Authorities and moderate clerics were shocked that young Indonesians could talk so blithely about the horrific bombings.

"Religious radicalism, when it is translated into violent methods in the name of religion, has received enough support – one in every 10 Muslims in Indonesia, LSI senior researcher Anies Baswedan said. "It seems small, but this is already quite big support for extreme acts."

The survey, based on 1,200 respondents across Indonesia's 33 provinces, showed 11.2 per cent believed suicide bombings were justifiable on occasion while 0.5 per cent said the method could always be justified to defend Islam from its enemies.

The survey also revealed that 8 per cent support masterminds of past suicide bombings, including Noordin M. Top, the most wanted terror suspect in Indonesia, who authorities say is an expert in recruiting young suicide bombers among the country's impoverished masses.

Police believe Top, a key operative of the al Qaeda-linked Jemaah Islamiah militant network, is on the run in rural areas of Indonesia's main Java island.

Anti-terror campaigns in Indonesia have faced hurdles, including perceptions that the United States is out to attack Islam as well as the ample space given to militant voices and their sympathisers in the Indonesian media.

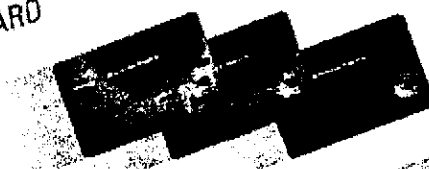
More recently, efforts to uproot radical Islam have been set back by anger over cartoons that lampooned the Prophet Mohammad, first published by a Danish newspaper.

**REUTERS** 

**[»RETURN TO PARENT SECTION](#)**

© You may not copy, republish or distribute this page or the content from it without having obtained written permission from the copyright owner. To enquire about copyright clearances contact [clearance@fairfaxnz.co.nz](mailto:clearance@fairfaxnz.co.nz)

INTRODUCING THE NEW  
QANTAS AMERICAN EXPRESS CARD



APPLY NOW  
FASTEN YOUR SEATBELT

[News Home](#) | [Photo Gallery](#) | [Video](#) | [Message Boards](#)

[Top Stories](#) | [Entertainment](#) | [World](#) | [Business](#) | [Travel](#) | [Tech](#) | [Sport](#)

[Summary](#) | [AAP](#) | [ABC](#) | [AFP](#) | [Reuters](#) | [Photos](#)

[China](#) | [Hong Kong](#) | [India](#) | [Indonesia](#) | [Japan](#) | [South Korea](#) | [New Zealand](#) | [Pakistan](#) | [Singapore](#) | [Taiwan](#)

Thursday March 16, 07:40 PM

## Indonesian terror survey 'wake-up call'



Eleven per cent of people in Indonesia, the world's most populous Muslim nation, believe suicide attacks against civilian targets are sometimes justifiable, a survey shows.

Though the number is relatively small, analysts say the findings of the Indonesian Survey Institute (LSI) are a wake-up call for Indonesian leaders and moderate clerics who fear a tiny radical Muslim fringe may be making inroads into the masses.

ADVERTISEMENT



**Earn 3 Altitude points per dollar spent on purchases.**

Apply for Altitude Gold before 31 March.

**Apply now.**

**Westpac**

Suicide bombings using the flag of Islam have killed hundreds in recent years in Indonesia, a country whose population of 220 million population is around 85 per cent Muslim - most of them following a moderate form of the religion.

But the government has been working to

weed out militant Islamic ideas since the discovery of videos last November showing the last words of suicide bombers who killed 20 people in restaurants on Bali last year.

### World

- "Dismal" world strategy on Darfur risks more horror
- UN tribunal says Milosevic not poisoned
- Hamas says cabinet to be finalized on Saturday
- US accuses Iran of "unhelpful activities" in Iraq
- Police arrest 187 over Paris clashes
- US presses assaults on guerrillas
- French government slams violence during protests
- Serb objections mar second round of Kosovo talks
- Asylum requests to West drop to near 20-year low
- Fatah decides not to join Hamas govt: officials

Authorities and moderate clerics were shocked that young Indonesians could talk so blithely about the horrific bombings.

"Religious radicalism, when it is translated into violent methods in the name of religion, has received enough support - one in every 10 Muslims in Indonesia, LSI senior researcher Anies Baswedan said.

"It seems small, but this is already quite big support for extreme acts."

The survey, based on 1,200 respondents across Indonesia's 33 provinces, showed 11.2 per cent believed suicide bombings were justifiable on occasion while 0.5 per cent said the method could always be justified to defend Islam from its enemies.

The survey also revealed that eight per cent support masterminds of past suicide bombings, including Noordin Top, the most wanted terrorist suspect in Indonesia, who authorities say is an expert in recruiting young suicide bombers among the country's impoverished masses.

Police believe Top, a key operative of the al-Qaeda linked Jemaah Islamiah militant network, is on the run in rural areas of Indonesia's main Java island.

Anti-terror campaigns in Indonesia have faced hurdles, including perceptions that the United States is out to attack Islam as well as the ample space given to militant voices and their sympathisers in the Indonesian media.

More recently, efforts to uproot radical Islam have been set back by anger over cartoons that lampooned the Prophet Mohammed, first published by a Danish newspaper.

**Next article:** [Taliban vows 'unimaginable' violence](#)

**Previous article:** [Police, protesters dead in Papua protest](#)

 [Email this story](#)



[Printer friendly version](#)

[Want up to 12 mths ½ price Net access?](#)

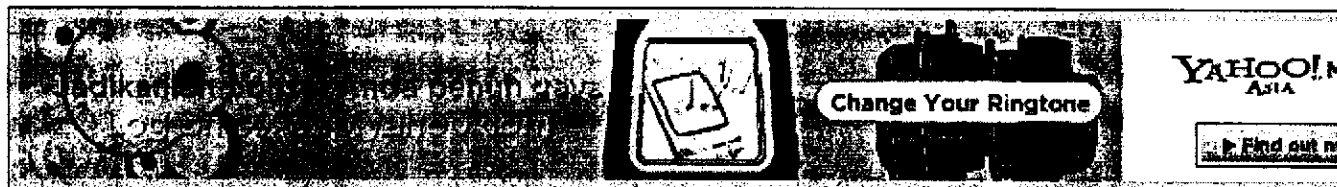


---

**[Make Yahoo! Your Home Page](#) | [Get Yahoo! Toolbar with Anti-Spy](#)**  
Copyright © 2006 Yahoo! Australia & NZ Pty Limited. All rights reserved.  
[Privacy Policy](#) - [Terms of Service](#) - [Help](#)

Partner copyright:  
Brought to you by AAP, Copyright © All Rights Reserved.

Questions or suggestions? Send us [feedback](#).



News Home Top Stories World **Asia Pacific** Business Technology Entertainment Sports Photos

-- News by

## Yahoo! Asia News

Search Yahoo! News

Thursday March 16, 7:50 PM



advertise



### Support for suicide bombing surprisingly big in Indonesia

(Kyodo) \_ A survey released Thursday shows that terrorism acts, including suicide bombings on civilian targets, are supported by one in 10 Indonesian Muslims.

"Religious radicalism, when it is interpreted into violent methods in the name of religion, has received enough support," the survey on the pros and cons of Islamic radicalism shows.

"It seems small, but big enough to support extreme acts....," the report adds.

Since 2002, suicide bombings have killed hundreds of people in Indonesia, including attacks in Bali in 2002 that killed 202 people, many of them holidaymakers.

Based on direct interviews with 1,173 people in the country's 33 provinces, the survey found 9.6 percent of the respondents believe "suicide bombings and other violent acts on civilian targets to defend Islam from its enemies" are sometimes justifiable.

Of the respondents -- 87.6 percent of them Muslims -- 1.6 percent said the acts can be frequently justified, while 0.5 percent said they can always be justified.

#### ADVERTISEMENT



The survey also shows 8 percent of the respondents agreed that bombing attacks committed by some terrorist suspects, such as Malaysian nationals Azahari and Nurdin Mohammad Top, are permissible as a form of opposition by Muslims against the West.

Azahari, believed to be a mastermind of a series of bombing attacks in Indonesia, was killed during a police raid in East Java Province last year.

Top, who is now the most-wanted terrorist suspect in Southeast Asia, is still at large.



Web ☒ MSNBC

Alerts Newsletters RSS Help

MSN Home Hotmail Sign In



MSNBC Home » World News » Asia-Pacific

## One in 10 Indonesians backs suicide bomb Institute conducting survey says findings are a wake-up call for leaders

**REUTERS**

Updated: 5:16 a.m. ET March 16, 2006

JAKARTA - Eleven percent of the people in Indonesia, the world's most populous Muslim country, believe suicide attacks against civilian targets are sometimes justifiable, a survey said on Thursday.

Though the number is relatively small, analysts say the findings of the Indonesian Survey Institute are a wake-up call for Indonesian leaders and moderate clerics who fear a tiny radical Muslim fringe may be making inroads into the general public.

Suicide bombings blamed on Islamic militants have killed hundreds in recent years in Indonesia, a country whose population of 220 million population is around 85 percent Muslim -- most of them following a moderate form of the religion.

Story continues below ↓

advertisement

### MOST POPULAR

**Most Viewed** • **Top Rated**

- 132 pounds removed in marath
- Cost of Iraq war could surpass
- U.S. soldier sees personal miss
- Clearing the air: Court blocks t
- Is Tom Cruise taking on 'South
- **Most viewed on MSNBC.com**

### RSS FEEDS ON MSNBC.COM

Add these headlines to your new

- **Asia-Pacific News**
- Learn more about RSS

#### World News

Intl Terrorism  
Conflict in Iraq  
Iraq: 3 Years Later  
Africa  
Americas  
Asia-Pacific  
Europe  
Mideast/N. Africa  
South/Central Asia

#### News Video

U.S. News

World News

Business

Sports

Entertainment

Health

Tech / Science

Weather

Travel

Blogs Etc.

Local News

Newsweek

Multimedia

Most Popular

NBC NEWS

MSNBC TV

Today Show

Nightly News

Meet the Press

Dateline NBC

## MSNBC Classifieds

Shopping

Jobs

Personals

with PerfectMatch.com

Autos

Real Estate

with HomePages.com

Advertisement

### MSN SHOPPING



#### Springtime color

- Neutrals
- Pastels
- Brights
- Black & white

### RESOURCE GUIDE

- Personals with PerfectMatch.com
- Find your dream home today!
- Buy Life Insurance
- Shopping

### Sponsors:

---

The government has been making an extra effort to counter militant Islamic ideas since the discovery of videos last November showing the last words of suicide bombers who killed 20 people in restaurants on Bali island last year. Authorities and moderate clerics were shocked that young Indonesians could talk so blithely about the horrific bombings.

"Religious radicalism, when it is translated into violent methods in the name of religion, has received enough support -- one in every 10 Muslims in Indonesia," LSI senior researcher Anles Baswedan said. "It seems small, but this is already quite a big support for extreme acts."

The survey, based on 1,200 respondents across Indonesia's 33 provinces, showed 11.2 percent believed suicide bombings were justifiable on occasion while 0.5 percent said the method could always be justified to defend Islam from its enemies.

The survey also revealed that 8 percent support masterminds of past suicide bombings, including Noordin M. Top, the most wanted terror suspect in Indonesia, who authorities say is an expert in recruiting young suicide bombers among the country's impoverished masses.

Police believe Top, a key operative of the al-Qaida-linked Jemaah Islamiah militant network, is on the run in rural areas of Indonesia's main Java island.

Anti-terror campaigns in Indonesia have faced hurdles, including perceptions the United States is out to attack Islam, as well as the ample space given to militant voices and their sympathizers in the Indonesian media.

### Support for shariah

The survey also found that almost half the respondents back stoning as a punishment for adulterers while support for other extreme elements of Islamic shariah was also significant.

However, LSI said the findings could be misleading.

"Agreement to ideas based on shariah was quite high but this trend was not reflected in the support for political parties that fight for the imposition of shariah in Indonesia," Baswedan said.

"Agreement ... does not equal to willingness to support (shariah) applications," he said.

The current parliament, elected in 2004, is dominated by parties against imposing strict shariah laws nationwide.

In their personal lives many Indonesians follow liberal practices, or mix ancient traditional religions and magic with Islam in ways that do not square with what they profess to be their beliefs.

The survey also showed that while more than 70 percent support the moderate beliefs of Nahdlatul Ulama, the largest Muslim group in Indonesia, minority respondents are more favorable to ultra-conservative groups than liberal ones.

Only 2.5 percent back the Liberal Islam Network while 11 percent agreed with causes advocated by the Indonesian Mujahidin Council of Abu Bakar Bashir, who has been convicted on terrorism charges and identified by intelligence officials as the leader of Jemaah Islamiyah.

MMI wants to Indonesia to become an Islamic state, while Jemaah Islamiyah has advocated a regional Islamic government.

*Copyright 2006 Reuters Limited. All rights reserved. Republication or redistribution of Reuters content is expressly prohibited without the prior written consent of Reuters.*

---

**Rate this story**   Low   ★★★★★   High

---

Current rating: 4 by 26 users   • **View Top Rated stories**

---



Print this



Email this



Blog this



IM this

---

#### MORE FROM ASIA-PACIFIC

**Next →**

**New Zealand volcano erupts; one missing**



HARIAN UMUM SORE

# SINAR HARAPAN

Kamis, 23 Maret 2006

Memperjuangkan Kemerdekaan dan Keadilan Kebenaran dan Perdamaian Berdasarkan Kasih

## Hasil Survei LSI: Kinerja Parpol Paling Buruk

- ✧ Halaman Utama
- ✧ Tajuk Rencana
- ✧ Nasional
- ✧ Ekonomi
- ✧ Uang & Efek
- ✧ Jabotabek
- ✧ Nusantara
- ✧ Luar Negeri
- ✧ Olah Raga
- ✧ Iptek
- ✧ Hiburan
- ✧ Feature
- ✧ Mandiri
- ✧ Ritel
- ✧ Hobi
- ✧ Wisata
- ✧ Eureka
- ✧ Kesehatan
- ✧ Cafe & Resto
- ✧ Hotel & Resor
- ✧ Asuransi
- ✧ Otomotif
- ✧ Properti
- ✧ Budaya
- ✧ CEO
- ✧ Opini
- ✧ Foto
- ✧ Karikatur
- ✧ Komentar Anda
- ✧ Tentang SH

Jakarta - Partai politik (parpol) memiliki kinerja paling buruk dibandingkan dengan lembaga publik lainnya, seperti lembaga kepresidenan, ketentaraan, kepolisian, dan bahkan DPR. Akibatnya, timbul kecenderungan menurunnya sentimen psikologis massa pemilih dalam Pemilu 2004 terhadap parpol saat ini.

Demikian hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) di Jakarta, Kamis (23/3), yang disampaikan oleh Direktur LSI Saiful Munjani. Survei dilakukan 10 sampai 15 Maret 2006 terhadap 1.200 responden yang tersebar di 33 provinsi dengan menggunakan data hasil Pemilu Legislatif 2004 dengan metode multistage random sampling.

Dikatakan hampir semua pemilih tidak mengetahui sikap dan keputusan partai yang dipilihnya pada saat pemilu lalu tentang isu yang terkait dengan kehidupannya sehari-hari seperti kebijakan BBM dan impor beras oleh pemerintah.

Para pemilih pun tidak merasakan fungsi intermediasi parpol sehingga besar kemungkinan sistem kepartaian di Indonesia ke depan akan semakin terfragmentasi. Hanya 48 persen responden menyatakan kinerja parpol baik ketimbang DPR (52 persen), presiden (71 persen), polisi (69 persen).

Saiful Munjani menjelaskan, setidaknya hanya satu dari sepuluh pemilih parpol yang sedikit mengetahui sikap parpol terhadap suatu kebijakan. Hanya 48 persen dari total responden yang mengaku kinerja parpol selama ini memperjuangkan kepentingan pemilihnya. Sementara, 28 persen mengaku buruk dan 24 persen tidak bisa menjelaskannya.

Kombinasi antara fungsi intermediasi dan hubungan psikologis massa pemilih dengan parpol, menurut Saiful, memunculkan empat tipe hubungan pemilih dengan parpol. Yang pertama, hubungan integrasi, yakni pemilih merasakan adanya fungsi intermediasi dan memunculkan ikatan psikologis yang positif.

Tipe kedua, yakni loyal, dimana pemilih merasakan adanya hubungan ikatan psikologis dengan parpol, tetapi tidak merasakan adanya fungsi intermediasi.

Sedangkan tipe ketiga, yakni pemilih merasakan adanya fungsi intermediasi tetapi tidak punya ikatan psikologis yang positif dengan partai. Dan tipe keempat, yakni teralienasi, dimana pemilih merasakan adanya fungsi intermediasi maupun hubungan psikologis yang positif dengan parpol.

Dari empat tipe itu, yang paling besar adalah tipe teralienasi (45 persen), seperti Partai Persatuan Pembangunan. Diikuti tipe pragmatis 28 persen, misalnya Partai Demokrat. Sementara, tipe loyal (13 persen). Tipe integrasi (tipe paling ideal), seperti Partai Amanat Nasional dan Partai Golkar (15 persen).

"Partai Demokrat adalah partai yang kekuatannya paling dinamis. Pada awal 2005, Partai Demokrat sempat menjadi partai yang paling berpeluang dipilih dengan perolehan suara paling banyak. Tetapi

kemudian mengalami penurunan yang cukup berarti sehingga berada pada urutan kedua bersama PDIP dalam survei terakhir ini," katanya. Partai Golkar kembali mengambil alih kendali. Dalam survei terakhir, Partai Golkar kemungkinan akan mendapat suara paling banyak bila diadakan pemilu. Namun demikian, Partai Demokrat juga mengalami kemajuan yang cukup besar dibandingkan partai-partai di sisi dua lain, seperti PKB dan PKS. Bukan tidak mungkin ia menjadi ancaman bagi PDIP dan Partai Golkar," tambah Saiful Munjani. (inno jemabut)

Copyright © Sinar Harapan 2002



Kamis, 23 Maret 2006

## Masyarakat Nilai Parpol tidak Ada Gunanya

**Jakarta-RoL--** Masyarakat menilai Partai Politik (Parpol) tidak ada gunanya karena tidak merasakan partai yang dipilihnya memperjuangkan kepentingannya.

Hal tersebut berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) terhadap tujuh parpol yaitu Partai Persatuan Pembangunan/PPP, Partai Demokrat/PD, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), dan Partai Golkar).

"Ini merupakan peringatan kepada parpol untuk segera berbenah dalam tiga tahun kedepan," kata Direktur Eksekutif, Saiful Mujani, di Jakarta, Kamis (23/3).

Hasil penelitian tersebut menyebutkan dari empat tipe (Integrasi, Pragmatis, Loyal dan Terasing) yang paling banyak adalah tipe terasing (Parpol tidak berguna) mencapai 45 persen, tipe pragmatis sebesar 27 persen, tipe integritas (15 persen), dan tipe loyal (13 persen)

Untuk PD dengan tipe terbesar pragmatis (35 persen), terasing (31 persen), PKB tipe pragmatis (30 persen), terasing (27 persen) dan PKS tipe terasing dan loyal (29 persen).

Untuk parpol yang mempunyai tipe terasing terbesar yaitu PPP tipe terasing mencapai 50 persen, PAN tipe terasing 34 persen, PDIP tipe terasing mencapai 34 persen, dan Golkar tipe terasing mencapai 34 persen.

Saiful menjelaskan tipe terasing merupakan tipe yang paling buruk karena masyarakat menilai partai yang dipilihnya tidak memperjuangkan aspirasi kepentingan mereka di satu pihak dan di pihak lain tidak merasa loyal dengan partai tersebut.

Ia menjelaskan dengan besarnya tipe terasing maka sangat banyak diantara pemilih yang merasakan tidak adanya fungsi intermediasi partai dan sistem kepartaian ke depan kemungkinan akan semakin terfragmentasi.

"Ini merupakan potensi bagi stabilitas sistem kepartaian yang ada saat ini," katanya.

Hasil penelitian LSI juga menyebutkan kinerja parpol juga menunjukkan hasil yang paling rendah yaitu hanya 48 persen, jika dibandingkan dengan presiden (71 persen), Polisi (69 persen), dan DPR (52 persen).  
**antara/pur**

()

**detikcom**

0 807 1 807 807

Bayar Tiket Online\*, bawa pulang 15 notebook  
setiap bulan & Grand Prize sebuah MPV



behind their strong opinion

detikNews | detikFinance | detikFood | detikHot | detiki-Net | detikSport | Foto | Indeks  
Info Iklan | SMSiklan | Sepakbola | Ticket Box | newsUpdate | detikShop | Surat dari Buncit  
:: Lifestyle | Cupid | Jodoh | 123 X-Fun | Iguana | boleh | mobile tren | fun dering | makan yoo ::

SELEMBUT AIR MATA

Hadir di  
14 cabang **BCA**

JANGAN CUMA  
JADI PEMBACA

Ingin nonton F1 di Inggris langsung...!!  
untuk 5 orang pemenang..!!

## LSI: 52% Responden Anggap Parpol Paling Buruk Kinerjanya

Nurvita Indarini - detikcom

Jakarta - Mau tahu sikap pemilih terhadap partai politik (parpol)? Tidak saja menuding parpol tak peka kepentingan politik, sebagian besar pemilih juga menganggap parpol paling buruk kinerjanya.

Sikap pemilih ini diketahui dari hasil survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI) sejak April 2004 sampai Maret 2006.

Hasil survei itu dibebaskan dalam jumpa pers LSI di Hotel Sari Pan Pacific, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Kamis (23/3/2006).

Dijelaskan Direktur LSI Syaiful Mudjani, hanya 48 persen pemilih saja yang merasakan parpol memperjuangkan kepentingan politiknya. Selebihnya menganggap parpol tidak memperjuangkan kepentingan politik mereka.

PT. Berca Computel

**D-Link**

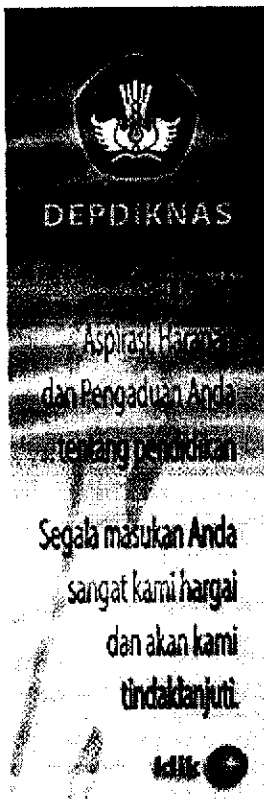
Building Networks for People

Solutions

Tuesday, 23 March 2006

Time: 9:00am - 2:00pm

Shangri-la Hotel Jakarta



**detikNews**

24/03/2006 11:52 WIB  
Ribuan Umat Islam Gelar Aksi Damai Dukung RUU APP Minggu

**detikNews**

24/03/2006 11:42 WIB  
Pemerintah Harus Jelaskan Molomya Jadwal RUU PA

**detikNews**

24/03/2006 11:38 WIB  
Tahanan LP Salemba Perang Batu

**detikNews**

24/03/2006 11:26 WIB  
Niat Nolong Ibu-Anak Turun Bus, Wartawan Dipukul Polisi

**detikNews**

24/03/2006 11:21 WIB  
PNS Jadi Anggota Parpol Bisa, Jadi Caleg No

Bahkan dibanding lembaga publik lainnya seperti presiden, polisi, tentara, dan DPR, parpol dinilai paling buruk kinerjanya. Hampir semua pemilih tidak tahu sikap dan keputusan partai tentang dua isu penting yaitu kenaikan BBM dan impor beras.

Dalam survei yang dilakukan di awal 2006, hanya sekitar 25 persen dari pemilih yang punya hubungan psikologis secara positif dengan parpol. Padahal di negara-negara demokrasi yang ada di AS atau pun Eropa barat rata-rata di atas 60 persen.

LSI memaparkan, ada 4 kombinasi antara fungsi intermediasi dan hubungan psikologis massa pemilih dengan partai, yakni integrasi, tipe loyal, rasional dan teralienasi (terasing). Di antara tipe ini yang terbesar adalah tipe terasing sebanyak 45 persen.

"Ini adalah tipe yang paling buruk tentang hubungan partai dengan massa pemilih. Besarnya proporsi ini mengindikasikan banyak yang kecewa terhadap parpol. Ini merupakan potensi bagi instabilitas sistem kepartaian," papar Syaiful.

Di antara 7 parpol besar yang punya proporsi paling ideal dan paling banyak adalah Golkar dan PAN. Yang punya tipe rasional paling banyak adalah Partai Demokrat. Sedangkan yang punya proporsi tipe loyal adalah PKS, dan paling banyak punya tipe terasing adalah PPP. Padahal yang ideal dari fungsi tersebut adalah kombinasi.

"Tapi dari survei yang kita lakukan golput terlihat lebih besar. Sebab sudah muncul kekecewaan masyarakat terhadap partai-partai besar yang tidak menguasai masalah-masalah publik, seperti impor beras, BBM dan sebagainya. Masyarakat pesimis pada parpol," tuturnya.

Sejak April 2004-Maret 2006, LSI sudah melakukan 7 kali survei di mana sampel di masing-masing survei 1.200 orang. Sementara *margin of error* di setiap survei kurang lebih 2,6 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Metode survei yang digunakan LSI adalah *multystate random sampling*.

Sementara wawancara yang dilakukan dengan tatap muka.

(umi)

**Baca juga:**

- Survei LSI: 74,3% Responden Tak Setuju Bom Bunuh Diri
- LSI: Masyarakat Sangat Terbebani dalam Membeli Beras
- Gagal Suksesnya Penanganan Tsunami Pengaruhi Politik Aceh
- Setahun Tsunami BRR Akui Belum Maksimal

Informasi pemasangan webtorial/iklan  
Hubungi bagian Iklan di [infoiklan@staff.detik.com](mailto:infoiklan@staff.detik.com)



Friday, March 24, 2006

# Big parties remain popular picks: Survey

The Jakarta Post  
Jakarta

**I**f the general election was today, how would you cast your vote?

The answer would likely be the same as in 2004, when the three biggest parties — the Golkar Party, the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P) and the Democrat Party — took the lead, says a survey by the Indonesian Survey Institute (ISI).

In the March 2006 survey, the three parties defeated the four other big parties, which each took below 10 percent of the "vote."

Thirty-four percent of respondents said they would abstain from voting.

In the survey, potential voters, whose personality profiles defined them as "integrated" or "rationally" and psychologically balanced, opted for Golkar.

The Democrat Party, which had the highest score of 28.4 percent in the survey in January 2005, ended up in second place in March 2006.

"If the people think a party is no longer making things better for them, they will shift allegiances," he said.

PDI-P and Prosperous Justice Party (PKS) voters also tended to be pragmatic.

However, a series of surveys, conducted from April 2004 through March 2006, revealed fluctuating figures, indicating inconsistencies in public support for the parties.

Saiful said this was the consequence of political parties' poor accountability and inability to accommodate the interests of voters.

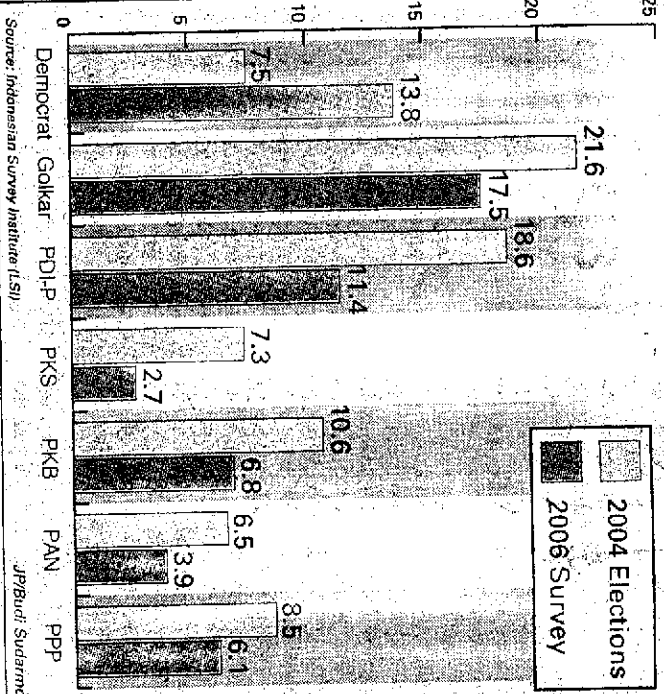
"The parties have not tried hard enough to convey sincerity, nor approached the public to explain what their current programs and policies are," he said. "This gives the public the impression the parties they voted for are not accommodating their interests."

The survey also showed a considerable number of people feel alienated or do not associate themselves emotionally with any party.

This impression substantiates the fact that votes for the seven major parties have decreased overall.

The survey showed that, in terms of public confidence, the parties are performing poorly. Impacts on to the public's confidence, such as the H...

**If an election for members of the House was held today, which party would you vote for?**



of Representatives, police and the presidential office.

The survey also showed the public is generally ill-informed about party activities and policies, particularly on the fuel price and rice import issues.

Up to 90 percent of respondents had no idea about their party's stance on the fuel price. While 10 percent were in the dark about rice prices.

He said the survey should be construed as an early warning for political parties to boost their performances by improving their communications and networking with constituents.

"We are going to upgrade our internal recruitment mechanism, so that we will have more credible candidates," Golkar deputy secretary Rudy Chandra said.

The Jakarta Post

Rakyat Merdeka: Jumat, 24 Maret 2006

## Hasil Survei LSI: Prestasi Parpol Jeblok, SBY-JK Terus Terganggu Elit Politik

**Jakarta, RM.** Masyarakat menilai, partai politik (parpol) memiliki kinerja paling buruk dibanding tiga lembaga lain yakni DPR, Kepresidenan dan Polri. Karena itu, di Pemilu 2009 nanti angka golput bakal meningkat.

Demikian hasil Survei terbaru Lembaga Survei Indonesia (LSI) tentang Evaluasi Pemilihan atas Kinerja Dua Tahun Partai Politik yang didiskusikan di Hotel Sari Pan, Jakarta Pusat, kemarin.

"Dari sisi fungsi intermediasi parpol, masih kurang dari separuh total pemilih, yaitu 48 persen, yang menilai bahwa parpol telah berfungsi memperantarai pemilih dengan kebijakan-kebijakan publik yang dibuat.

Dibanding tiga lembaga lain, yakni Kepresidenan (71 persen), Polri (69 persen) dan DPR (52 persen) yang juga dinilai buruk, parpol adalah lembaga yang paling buruk kinerjanya," kata peneliti utama dan juga Direktur Eksekutif LSI, Saiful Mujani.

Selain dari sisi intermediasi, lanjut Saiful, penilaian paling buruk juga dilihat dari fungsi *accountability* parpol atau keterbukaan tentang keputusan-keputusan publik yang dibuat parpol.

"Misalkan, publik tidak tahu bagaimana keputusan parpol-parpol untuk beberapa isu publik yang krusial, seperti kenaikan harga BBM

◆ BERSAMBUNG KE HAL 8

## Hasil Survei

dan impor beras. Publik menilai secara umum, Parpol masih jauh dari *accountable*. Hanya sekitar 1 dari 10 penilih yang mengetahui sikap parpol yang mereka pilih untuk dua isu tersebut. Jadi, 90 persen penilih atau hampir semua penilih tidak tahu sikap dan keputusan parpol. Karena itu pada umumnya publik menilai bahwa parpol-parpol yang mereka coblos saat Pemilu tidak memperjuangkan aspirasi mereka selama dua tahun ini," terang dia.

Kata Saiful, biasanya proporsi ini mengindikasikan banyak yang kecewa terhadap parpol. Ini merupakan potensi

..... dan halaman 1

bagi instabilitas sistem kepartaian. Di antara tujuh parpol besar yang punya proporsi paling ideal dan paling banyak adalah Golkar dan PAN. Yang punya tipe rasional paling banyak adalah Partai Demokrat. Sedangkan yang punya proporsi tipe loyal adalah PKS, dan paling banyak punya tipe terasing adalah PPP.

Menurut Saiful, akuntabilitas parpol ini penting, karena selama ini parpol nyatanya gagal menjelaskan posisi mereka kepada pemilih dalam isu-isu penting. "Misalnya, ternyata pemilih tidak pernah tahu apa sikap partai yang mereka pilih tentang kenaikan harga

BBM dan impor beras. Itu artinya, tidak terjadi pertanggungjawaban partai kepada konstituennya," kata Saiful.

Kondisi tersebut, jelas pria yang akrab disapa Kak Ipung ini, merupakan *warning* serius bagi demokrasi Indonesia. Apalagi, upaya mengoptimalkan fungsi internal parpol tersebut terhambat oleh terfragmentasinya sistem kepartaian. "Ini akan membuat pemerintahan tidak mudah bekerja. Energi politik akan semakin banyak diserafkan untuk *padding* di tingkat elite," katanya.

27 persen pada Maret 2006. Angka ini, kata Saiful, terlalu rendah jika dibandingkan dengan negara-negara demokrasi seperti Amerika Serikat yang mencapai 66 persen atau Eropa Barat yang mencapai 61 persen. Rendahnya hubungan emosional ini, tambahnya, berpotensi menurunkan tingkat partisipasi rakyat dalam pemilihan umum atau potensi rakyat untuk memilih golput semakin tinggi.

Wasekjen Partai Golkar Rully Chahrul Azwar mengatakan hasil survei ini memang tidak bisa dihindari. Untuk itu pihaknya akan terus melakukan komunikasi dengan para konstituen. Terutama menjelang pelaksanaan Pemilu 2009 nanti. ■ BUK/KRS

# Loyalitas ke Partai Rendah

Golput cenderung meningkat.

**JAKARTA**—Loyalitas pemilih terhadap partai politik sangat rendah. Hasil jajak pendapat Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan hanya 25 persen pemilih yang menganggapnya hubungan psikologis secara positif dengan partai.

Selanjutnya, 75 persen, adalah massa yang memandang "ujar Saiful Mujani, Direktur LSI, di Jakarta kemarin. Menurut dia, kondisi ini mencemaskan karena berpotensi menciptakan kondisi politik dan demokrasi yang buruk pada masa mendatang. Ia berharap yang telah maju demokrasinya, rata-rata tingkat loyalitas pemilih terhadap partai mencapai 60 persen.

Apalagi, selanjutnya dengan loyalitas yang rendah itu, dibanding lembaga publik lainnya seperti presiden, po-

lisi, tentara, dan Dewan Perwakilan Rakyat, partai dinilai paling buruk kinerjanya. Hampir semua pemilih tidak tahu sikap dan keputusan partai tentang dua isu penting, yaitu kenaikan harga bahan bakar minyak dan impor beras. Survei menunjukkan hanya 48 persen pemilih yang merasakan partai politik memperjuangkan kepentingan politiknya.

Hasil itu didapat dari survei tujuh kali pada April 2004-Maret 2006. Sampel di masing-masing survei 1.200 orang. *Margin of error* di setiap survei kurang-lebih 2,6 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Menurut lembaga survei itu, ada empat tipe hubungan pemilih dengan partai. Pertama, integrasi, yakni merasakan adanya fungsi intermediasi dan munculnya ikatan psikologis positif. Kedua, tipe loyal, yakni yang merasakan adanya ikatan psikologis dengan partai tapi u-

dak merasakan adanya fungsi intermediasi.

Lalu, ketiga, rasional atau pragmatis, yakni merasakan adanya fungsi intermediasi tapi tidak punya ikatan psikologis yang positif dengan partai. Terakhir, tipe terasing, yakni tidak merasakan adanya fungsi intermediasi ataupun hubungan psikologis yang positif dengan partai.

Tipe terakhir menjadi mayoritas, yakni 45 persen. Tipe ini adalah tipe paling buruk tentang hubungan partai dengan massa pemilih. "Bersartanya proporsi ini mengindikasikan banyak kecewa terhadap partai dan menjadi potensi bagi instabilitas sistem kepartaian," ujar Saiful.

Di antara tujuh partai besar yang punya tipe terasing terbanyak adalah Partai Persatuan Pembangunan. Adapun proporsi tipe paling ideal diraih Golkar dan Partai Amanat

Nasional. Partai Demokrat punya tipe pragmatis terbanyak. Sedangkan yang punya proporsi tipe loyal paling besar adalah Partai Keadilan Sejahtera.

Melihat hasil hubungan partai dan pemilih seperti itu, Saiful berpendapat jumlah golongan yang tidak memilih dalam pemilu (golput) cenderung akan meningkat. Pada Pemilu 1999 ada 85 persen pencoblos dari total pemilih dan pada Pemilu 2004 ada 77 persen, maka "Pada Pemilu 2009 mungkin akan menurun lagi."

Ketua Partai Golkar Andi Mattalata menilai survei itu bukan ditujukan kepada partai politik, melainkan kepada politikus. "Jadi pemilih jengkel kepada tokoh yang berpolitik, bukan kepada partainya." Sebab, banyak pemilih yang tetap suka partainya tapi tak suka politikusnya. Sehingga, menurut dia, hasil survei itu tidak seluruhnya benar. • **INDONESIA**

**SURVEI LSI**

## **Fragmentasi Politik Cenderung Meningkat**

JAKARTA, KOMPAS — Dalam survei nasional yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia atau LSI, Direktur-Eksekutif LSI Saiful Mujani mengemukakan ada indikasi bahwa pada masa mendatang fragmentasi politik di Indonesia akan meningkat. Dalam studi perilaku politik yang mereka lakukan, masalah pokok itu terjawab ketika ditemukan bahwa sebagian besar pemilih tidak merasakan fungsi intermediasi partai yang dipilihnya.

Selain itu, dibandingkan dengan lembaga publik lainnya, seperti Presiden, DPRD, polisi, dan tentara, kinerja partai politik dinilai paling buruk. Dalam survei itu, hampir semua pemilih tidak mengetahui sikap dan keputusan partai yang mereka pilih tentang dua isu yang dinilai penting, yaitu kenaikan harga bahan bakar minyak dan keputusan pemerintah tentang impor beras.

"Dalam dua tahun terakhir ada kecenderungan menurunnya sentimen psikologis massa pemilih terhadap partai politik," tutur Saiful, Kamis (23/3) di Jakarta. Dalam survei yang menggunakan sampel 1.200 responden untuk masing-masing survei diperlihatkan hanya satu dari 10 pemilih partai mengetahui sikap partai yang dipilihnya. Menurut Saiful, itu mengindikasikan bahwa

akuntabilitas partai politik di Indonesia rendah.

Kajian itu, menurut dia, menunjukkan tanggung jawab partai terhadap konstituen mereka juga cukup rendah. Rendahnya hubungan emosional antara pemilih dan partai yang dipilihnya, tutur Saiful, akan memunculkan massa mengambang. Kondisi itu, menurut dia, tak sehat bagi iklim demokrasi di Indonesia karena kemungkinan akan muncul partai-partai kecil yang mencoba menampung massa itu.

Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum tidak merisaukan hasil survei itu meskipun dalam survei itu tingkat kepercayaan warga terhadap partai itu menurun. Menurut dia, yang perlu dicermati adalah kepercayaan publik pada partai. Ia melihat hal itu dapat menjadi ancaman serius bagi masa depan demokrasi. Oleh karena itu, secara internal partai harus memperbaiki diri.

Wakil Sekjen DPP Partai Golongan Karya, Rully Chairul Azwar, melihat berbagai persoalan muncul antara partai dan konstituen mereka kemungkinan disebabkan oleh masih mudanya tradisi kepartaian di Indonesia.

"Kemampuan agregasi dan artikulasi dalam komunikasi politik partai juga masih baru," tutur Rully. (JOS)

## Kedekatan Pemilih dengan Parpol Semakin Jauh

### ■ Hasil Survei LSI

**JAKARTA** Hampir dua tahun pasca-pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, publik secara umum menilai bahwa fungsi intermediasi dan *accountability* parpol masih rendah. Berkaitan dengan hal itu, kedekatan dengan partai politik juga semakin jauh.

Demikian salah satu simpulan hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) tentang Evaluasi Pemilih atas Kinerja Dua Tahun Partai Politik-Temuan Survei Nasional Sampai Maret 2006, yang dipaparkan kemarin.

Dalam pemaparan yang dilakukan oleh Direktur Eksekutif LSI, Saiful Mujani PhD, tersebut juga hadir beberapa fungsionaris parpol, seperti Rully Chairul Azwar (Partai Golkar), Anas Urbaningrum (Demokrat), dan Sayuti Asyatri (PAN), sebagai komentator.

Menurut Saiful, dalam survei yang dilakukan sejak April 2004 sampai Maret 2006 tersebut, LSI mendapatkan beberapa temuan. Yaitu, di antara tujuh parpol besar — masing-masing Golkar, PDI-P, PD, PAN, PPP, PKB, dan PKS —, yang punya proporsi paling ideal (integrasi) paling banyak adalah Golkar dan PAN.

"Untuk partai yang masuk tipe integratif (Golkar dan PAN), para pemilih merasakan bahwa partai telah berjuang untuk kepentingan mereka, sehingga terciptalah loyalitas," kata Saiful.

Sementara itu yang punya proporsi tipe pragmatis, paling banyak adalah Partai Demokrat. Yang punya proporsi tipe loyal paling banyak adalah PKS, dan yang paling banyak punya tipe terasing adalah PPP. Sementara itu PDI-P dan PKB, di mata pemilih tergolong serba tangung.

Dalam tipe pragmatis atau rasional, pemilih merasakan fungsi intermediasi partai, tapi tidak punya ikatan emosional yang cukup kuat dengan partai.

Untuk tipe loyal, hubungan emosional pemilih dengan partai cukup kuat, dan itu tidak terpengaruh oleh kondisi partai, walaupun sesungguhnya intermediasi partai itu lemah sekalipun.

Pada tipe terasing, pemilih merasakan fungsi intermediasi partai sangat rendah, juga tidak

punya lagi hubungan emosional.

#### Paling Buruk

Dari hasil survei tersebut juga ditemukan bahwa parpol adalah lembaga yang dinilai paling buruk kinerjanya dibandingkan lembaga publik lainnya, seperti presiden, polisi, tentara, dan DPR.

Hampir semua pemilih (90 persen) tidak tahu sikap dan keputusan partai tentang dua isu yang sangat penting, yakni kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan impor beras.

Selain itu, pemilih juga banyak yang berpendapat kalau partai politik kelihatannya saling mengkritik, namun mereka sebenarnya tidak punya perbedaan yang jelas dalam program.

Menanggapi ketidaktahuan pemilih, Anas Urbaningrum mengatakan, hal itu menguntungkan partai yang dekat dengan kekuasaan. Karena partai yang memilih menjadi oposisi pun belum bisa menanggung keuntungan, walaupun mereka sudah mengusung isu-isu yang populer, seperti impor beras, BBM, dan terakhir adalah Blok Cepu.

"Jadi faktanya, antara pemilih dengan partai yang dipilih ada kesenjangan informasi. Itu bisa juga karena masyarakat pemilih terlalu acuh dengan urusan politik. Mereka baru bangkit kesadarannya saat menjelang pemilu," kata mantan ketua umum PB HMI tersebut.

Sementara itu Rully Chairul mengatakan, politik segalanya bisa berubah dengan cepat. Oleh karena itu Golkar tetap mencermati perkembangan yang terjadi, serta tidak terlalu bersenang diri, walaupun survei LSI menggunakan metodologi yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Baik Anas, Sayuti, maupun Rully berpendapat bahwa loyalitas yang membabi buta terhadap parpol, walaupun dirasa menguntungkan, bukanlah menjadi pendidikan yang baik bagi demokrasi dan partai itu sendiri.

"Kepercayaan publik terhadap partai harus sehat dan kuat. Justru tidak baik, kalau terlalu membabi buta. Tidak mungkin demokrasi bisa sehat tanpa didukung partai-partai yang kuat dan sehat," kata Anas. (F4-49a)

## LSI: Parpol Membre, Golput Tinggi

**Menteng, Warta Kota**

Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyodorkan temuan barunya, yakni membentunya partai politik (parpol) dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat membuat potensi massa golput atau mereka yang tidak memilih dalam pemilu meningkat. Kondisi itu membuat perkembangan demokrasi di negeri ini tidak sehat.

Hasil survei terbaru LSI menunjukkan bahwa 34 persen warga masyarakat memilih untuk tidak memilih jika pemilu diadakan saat ini. Sebagai pembandingan, jumlah massa golput pada pemilu April 2004 sebanyak 20 persen.

Temuan LSI tersebut, Kamis (23/3) dipaparkan di Hotel Sari Paksi Pasifik, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat. Hadir sebagai narasumber peneliti LSI Saiful Mujani dan Sekjen Partai Golkar Rully Khaerul Aswar. Survei LSI tersebut melibatkan 1.200 warga sebagai responden yang dipilih secara acak di seluruh Indonesia sekaligus dan diinstitusikan sebagai evaluasi terhadap kinerja parpol dua tahun setelah Pemilu 2004. Survei diadakan pada 10-15 Maret 2006 dengan tingkat kesalahan



Saiful Mujani

2,6 persen. Menurut Saiful, salah satu aspek yang banyak disorot dalam survei tersebut ialah masalah ketertutupan elite parpol dalam membahas isu penting yang berdampak luas. Misalnya, saat terjadi kenaikan harga bahan bakar minyak dan rencana impor beras oleh pemerintah.

"Pembahasan sikap parpol terhadap isu tersebut tidak pernah dilakukan terbuka sehingga publik menilai parpol tidak *accountable*. Masyarakat tidak merasa kepentingannya diperjuangkan di DPR," tuturnya.

LSI juga menemukan betapa rendahnya tingkat hubungan emosional masyarakat dengan parpol. Menurut dia, semua kondisi itu akan bermuara pada

da tingkat kepercayaan dan partisipasi pada pemilu mendatang juga menurun.

Selain menemukan tingginya persentase (34 persen) warga yang memilih untuk tidak memilih jika pemilu diadakan saat ini, LSI juga menemukan bahwa 28 persen responden menilai kinerja parpol dalam memperjuangkan kepentingan umum masih buruk, sementara 48 persen menilai baik. Dibandingkan lembaga lain, hanya 48 persen responden yang menilai kinerja parpol lebih baik, sementara presiden (71 persen) dan polisi (69 persen).

Saiful juga mengatakan bahwa parpol besar mendapat penilaian cukup tinggi untuk dipilih dalam pemilu mendatang yaitu Partai Demokrat, Golkar, dan PDIP. Peluang Partai Demokrat sangat ditentukan oleh kinerja pemerintah yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan dukungan parpol tersebut.

"Kalau presiden berhasil menjalankan pemerintah dengan baik, besar kemungkinan partainya akan mendapat banyak suara. Sekurangnya di tempat kedua partai besar," tuturnya. (max)



# Kinerja Parpol Terburuk

**Kalau pemilu digelar sekarang, Golkar menang.**

**JAKARTA**—Partai politik yang merupakan pilar demokrasi kian mengprihatinkan. Setelah disimpul sebagai lembaga terkorp oleh survei Transparency International (TI), parpol kembali disebut sebagai lembaga berkinerja paling buruk di Indonesia. Kali ini hasil penelitian Lembaga Survei Indonesia (LSI).

Dalam hal kinerja, menurut hasil survei LSI, responden menempatkan parpol di tempat keempat setelah presiden, polisi, dan DPR.

**“Mengapa parpol terpuruk? Ada sejumlah alasan yang ditemukan LSI. Antara lain fungsi internedi-**

**si parpol yang lemah. LSI menemukan parpol yang sekitar 48 persen memilih yang merasa parpol memperjuangkan kepentingan pemilih. LSI juga menemukan kecenderungan penurunan sentimen psikologis massa pemilih terhadap parpol. Dalam dua survei terakhir tahun 2006, LSI menemukan hanya sekitar 25 persen pemilih yang punya hubungan psikologis secara positif dengan parpol. Proporsi ini dinilai LSI terlalu rendah dibanding AS dan Eropa yang rata-rata 60 persen.**

“Rendahnya hubungan psikologis yang positif antara massa pemilih dengan partai potensial menurunkan tingkat partisipasi dalam pemilu, dan membuat sistem kepartaian semakin terfragmentasi,” kata Direktur Eksekutif LSI, Saiful Mujani, dalam paparan survei LSI, di Jakarta, Kamis (23/3).

Kombinasi antara fungsi internedi dan hubungan psikologis massa pemilih dengan partai memunculkan empat tipe hubungan pemilih dengan partai. Yaitu integrasi, loyal, rasional/pragmatis, dan terasing. Di antara keempat tipe ini, yang terbesar adalah tipe terasing, tipe paling buruk tentang hubungan partai dengan pemilih.

“Data ini harus dibaca bahwa kinerja parpol memang paling buruk,” kata Saiful Mujani. Dalam paparan hasil survei, hadir dua penbendah yang Ketua Bidang Politik Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, dan Wakil Sekjen Partai Golkar, Rully Chairul Azwar.

Paparan kemarin, merupakan hasil rangkaian survei nasional LSI yang digelar sejak April 2004 hingga Maret 2006 itu. Setiap survei dengan metode *multistage random sampling* itu melibatkan 1.000 responden itu. Adapun *margin of error* survei sekitar 2,6 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Bagaimana jika pemilu dilaksa-

nakan saat ini? Mujani memperkirakan Golkar akan meraih 17,5 persen suara, disusul Partai Demokrat (13,8 persen), PDIP (11,4 persen), PKB (6,8 persen), PPP (6,1 persen), PAN (3,9 persen), dan PKS (2,7 persen).

Anas mengatakan kinerja parpol dinilai dari anggota DPR. Untuk meningkatkan citra, maka parpol perlu meningkatkan mutu kaderinya di parlemen. Namun Anas juga menilai keloyalan pemilih pada parpol karena hubungan psikologis tidak sehat untuk demokrasi modern. “Seharusnya pemilih loyal karena program partai,” katanya.

Menurut Anas, untuk meningkatkan kualitas parpol bisa dilakukan dengan mengkaji ulang Undang-undang (UU) Partai Politik dan UU Pemilu. Khususnya, kata dia, soal syarat pendirian parpol atau pembatasan parpol ikut pemilu. Dia mengusulkan *electoral threshold* dinaikkan dari tiga persen menjadi lima persen.

“Banyak sedikitnya partai bukan ciri demokrasi, tapi lebih pada bekerja tidaknya partai secara fungsional,” ujarnya.

Sementara Wakil Sekjen DPP Partai Golkar, Rully Chairul Azwar, juga setuju bila jumlah parpol dibatasi. “Idealnya kurang dari 10, antara lima sampai tujuh,” kata Chairul. Namun sebaliknya, kata

dia, pengurangan jumlah parpol dilakukan secara alamiah melalui pemilu sistem distrik.

Parpol peserta Pemilu 2004 lalu berjumlah 24, dan yang mendapatkan kursi hanya tujuh parpol. Adapun pemilu sampai saat ini masih menggunakan sistem proporsional. Tapi Rully menilai sistem distrik baru bisa diterapkan pada 2019, karena masih cenderung menguntungkan partai besar. Saat ini, kata dia, perlu tetap dilaksanakan sistem campuran. ■

## Fakta Angka

**71 %**

Presiden

**69 %**

Polisi

**52 %**

DPR

**48 %**

Parpol

Kinerja lembaga lembaga politik menurut persepsi responden (pada skala baik dan sangat baik).



## Kinerja Parpol Paling Buruk

**JAKARTA (Media):** Partai politik (parpol) adalah lembaga yang kinerjanya paling buruk bila dibandingkan dengan presiden, Polri, TNI, dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Berdasarkan survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) sejak April 2004 hingga Maret 2006, hanya 48% pemilih yang merasakan parpol memperjuangkan kepentingan politik mereka. Selebihnya menganggap parpol tidak memperjuangkan kepentingan mereka.

"Bila dibandingkan dengan lembaga publik lainnya seperti presiden, Polri, TNI, dan DPR, parpol dinilai paling buruk kinerjanya. Hampir semua pemilih tidak tahu sikap dan keputusan partai tentang dua isu penting, yaitu kenaikan BBM dan impor beras," kata Direktur LSI Saiful Mujani di Jakarta, kemarin.

Dari survei pada awal 2006, hanya sekitar 25% dari pemilih yang punya hubungan psikologis secara positif dengan parpol. Padahal di negara-negara demokrasi yang ada di AS ataupun Eropa Barat, rata-rata di atas 60%.

LSI memaparkan ada empat kombinasi antara fungsi intermediasi dan hubungan psikologis massa pemilih dengan partai, yakni integrasi, tipe loyal, rasional, dan teralienasi (terasing). Di antara tipe itu yang terbesar adalah

tipe terasing sebanyak 45%. "Ini adalah tipe yang paling buruk tentang hubungan partai dengan massa pemilih. Besarnya proporsi ini mengindikasikan banyak yang kecewa terhadap parpol. Ini merupakan potensi bagi instabilitas sistem kepartaian," papar Saiful.

Di antara tujuh parpol besar, yang punya proporsi paling ideal dan paling banyak adalah Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN). Yang punya tipe rasional paling banyak Partai Demokrat. Sedangkan yang punya proporsi tipe loyal, Partai Keadilan Sejahtera dan yang paling banyak punya tipe terasing adalah Partai Persatuan Pembangunan. Padahal yang ideal dari fungsi tersebut adalah kombinasi.

"Tapi dari survei, potensi golput terlihat lebih besar. Sebab sudah muncul kekecewaan masyarakat terhadap partai-partai besar yang tidak menguasai masalah-masalah publik. Masyarakat pesimistis pada parpol," tutur Saiful.

Sejak April 2004 hingga Maret 2006, LSI sudah melakukan tujuh kali survei, dengan sampel di setiap survei 1.200 orang. *Margin of error* di setiap survei kurang lebih 2,6% pada tingkat kepercayaan 95%. Sedangkan metode survei yang digunakan yaitu *multistate random sampling*, wawancara dengan tatap muka. (\*/P-2)

# DATA LEMBAGA SURVEI INDONESIA

# Kepercayaan Publik ke Parpol Turun

**JAKARTA** - Komitmen, pertanggungjawaban partai politik (parpol) terhadap konstituennya masih sangat minim. Hasil penelitian Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan tidak transparannya parpol memberikan informasi putusan partai, membuat pemilih menjadi tak respek terhadap parpol tersebut. Direktur Eksekutif LSI Saiful Mujani dalam paparan hasil surveynya mengatakan, saat ini ada kecenderungan partai papan atas dan menengah mulai melupakan pemilihnya.

Untuk diketahui, responden dalam survei yang dilakukan LSI ini mencapai 1.200 orang dengan kemungkinan margin error 2,6%. Metode surveynya adalah multi-stage random sampling. Pada salah satu poin survei LSI menyebutkan, ada empat kombinasi antara fungsi internalisasi dan hubungan psikologis massa pemilih dengan partai, yakni integrasi, loyalitas, rasional dan terahensi (terasing).

Di antara tipe ini yang terbesar adalah tipe terasing sebanyak 45 persen. "Tipe itu merupakan bagian yang paling buruk tentang hubungan antara partai dan massa pemilih," papar Mujani. Artinya, besarnya proporsi ini mengindikasikan betapa besar kekecewaan para konstituen terhadap kinerja parpol.

Indi... In m... di wa... ang... butuh... part... yak... orang... gota... de-... nya... kan s... at me...

bagi parpol untuk segera memperbaiki hubungannya dengan massa konstituen. Kalau persoalan ini tetap dibiarkan dikhawatirkan akan menjadi bibit potensi bagi instabilitas sistem kepartaian.

Di antara tujuh parpol besar yang punya proporsi paling ideal dan paling banyak adalah Golkar dan PAN. Sementara partai yang mempunyai tipe rasional, paling banyak adalah Partai Demokrat.

Sedangkan PKS mempunyai tipe proporsi loyal dan PPP yang paling banyak memiliki tipe terasing. Padahal yang ideal dari fungsi tersebut adalah kombinasi di antara unsur itu.

Mujani melanjutkan, parpol seharusnya menunjukkan akuntabilitasnya. Namun, yang terjadi saat ini parpol besar—termasuk Golkar, PDIP, atau Partai Demokrat—gagal menjelaskan posisi mereka dalam beberapa isu.

Dicontohkan Mujani, ketika parpol memutuskan mengulirkan isu bahan bakar minyak (BBM) atau impor beras, ironinya para pemilih justru tidak mengatahunya.

Melihat kondisi demikian, sangat wajar muncul persepsi negatif terhadap parpol tidak memenuhi kewajiban kepentingan pemilih. Selain itu, juga menyebabkan rendahnya hubungan emosional pemilih dengan partai.

SINDO/AGUS

## PERSENJASE PEMILIH JIKA PEMILU LEGISLATIF DIADAKAN HARI INI

Partai	Pemilu April	Jan-05	Apr-05	Juni-05	Sep-05	Des-05	Jan-06	Mar-06
Demokrat	7,5	28,4	20,9	19,0	16,4	16,5	14,4	13,8
Golkar	21,6	14,7	16,7	16,0	14,9	14,2	17,7	17,5
PDIP	16,6	13,5	17,6	16,0	14,9	14,2	12	11,4
PKS	7,3	10,1	6,8	3,4	2,7	2,7	4,2	2,7
PKB	10,6	7,5	8,1	6,6	6,4	7,3	7	6,8
PAN	6,5	3,6	2,6	2,9	2,9	2,4	2,9	3,9
PPP	8,9	2,4	3,4	4	4,4	3,9	4,5	6,1

Keterangan: Ditimbang berdasarkan persentase  
Sumber: Hasil Survei LSI Maret 2006

Nuarnya, angka golput pada pemilu mendatang bisa saja menjadi besar," jelas Mujani. Ditambahkan dia, bila kondisi itu tetap dipertahankan, bisa menjadi ancaman serius terhadap sistem kepartaian dan demokrasi.

Terfragmentasinya sistem kepartaian juga membuat jalanya pemerintahan tidak efektif. Pasalnya, seluruh energi dan politik terkurus menghadapi politicking di tingkat elite.

Padaahal, tenaga itu justru dibutuhkan untuk mengoptimalkan fungsi intermediasi parpol atas kepentingan publik dan putusan-putusan yang dibuat elite partai.

Bagaimana tanggapan pimpinan parpol? Salah satu Ketua DPP PDIP Maruarar Sirati menjelaskan hubungan psikologi parpol dengan konstituen sangat berpengaruh terhadap masa depan partai. Namun, hubungan itu harus dilihat lebih spesifik lagi,

hubungan psikologis," tandanya Wakil Sekjen DPP Partai Golkar Rully Chairul Azwar bisa memahami apa yang terjadi saat ini. Namun, dia mengingatkan fenomena akan berubah saat mendekati pemilu. Dikatakan Rully pemahaman seperti itu sangat terkait erat dengan kerja partai yang diwakilkan fraksinya di DPR. Keberadaan infrastruktur serta mesin politik juga ikut mengantungi.

"Meskipun ada, rakyat pasti kritis menilai apaakah infrastruktur serta mesin politik keahadirannya berguna bagi mereka," papar Rully. Namun, dia mengingatkan harus ada iklim yang mendukung kinerja parpol.

Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbanningrum memahami ada kendala komunikasi partai dengan pemilih. Namun, keli Anas, penyebabnya adalah pelaksanaan rezim Orde Baru terhadap sistem multipartai. "Sangat jelas, saat itu sama sekali tidak ada keseriusan pemerintahan membangun sistem kepartaian. Jadi, parpol sekarang masih banyak belajarnya," terang Anas.

Dia juga mengingatkan pemilih yang masih belum stabil berafiliasi terhadap suatu parpol bukan menjadi ancaman. Justru, ucap Anas, hal itu bisa menjadi peluang bagi parpol mengikat mereka. "Sekarang tinggal bagaimana parpol mengentas isu."

Home ■ News ■ Nasional ■ Kinerja Parpol Paling Buruk



Home

Topik Berita

Web Link

Kontak

Buku Tamu

Arsip Berita

SiteMap

## SUMEKS ONLINE

Kontak Sumeks

Pencarian

Arsip Berita

Buku Tamu

Links

## TOPIK BERITA

Home

News

Berita Utama

Nasional

Internasional

Olahraga

Opini

Hiburan

Society

Metrobisnis

Metropolis

Plaju & Kertapati

Sukaramé

Perumnas & Lemabang

Hidup Sehat

Dor

Pendidikan

Sumsel

## Kinerja Parpol Paling Buruk

Jumat, 24 Maret 2006

JAKARTA – Setelah dicap sebagai lembaga terkorup oleh Transparency International partai politik kembali mendapatkan predikat sebagai lembaga yang berkinerja terburuk dibandingkan lembaga lain. Predikat itu merupakan kesimpulan Lembaga Survei Indonesia setelah melakukan survei hingga Maret 2006.

Dari hasil survei tersebut diketahui, setelah dua tahun memilih, sejak Pemilu 2004, pul umum menilai bahwa fungsi intermediasi dan accountability partai sangat rendah. "Kedek pemilih dengan parpol juga semakin jauh," ujar Direktur Eksekutif LSI Saiful Mujani saat c Evaluasi Pemilih atas Kinerja Dua Tahun Partai Politik di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, l (23/3).

Survei LSI tersebut dilakukan secara nasional melalui wawancara tatap muka dengan responden. Survei dilakukan tujuh kali sejak April 2004 hingga Maret 2006. Margin of error survei sekitar 2,6 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Dibandingkan lembaga lain, parpol juga menempati peringkat terbawah dalam penilaian oleh publik. Presiden dinilai baik oleh 71 persen responden. Lembaga kepolisian (69 pers menempati posisi kedua dan berikutnya adalah DPR (52 persen). Parpol menempati posi "Selisih antara parpol dan DPR sedikit. Sebab, kedua lembaga itu mempunyai keterkaitan publik lebih mudah melihat kinerja DPR dibandingkan parpol," jelas Saiful.

Khusus untuk parpol, 48 persen responden menyatakan bahwa kinerja parpol baik. Ku separo responden. Angka itu dinilai kurang, apalagi dibandingkan ukuran relatif lembaga "Idealnya, minimal di atas 50 persen," ujarnya.

Apa alasan para pemilih, sehingga menilai kinerja parpol belum baik? Sebagian besar responden berpendapat, para pemimpin parpol umumnya hanya memikirkan kepentingan masing. Tidak banyak yang memikirkan rakyat yang memilih mereka dalam pemilu. Ada j berpendapat, parpol hanya melayani kepentingan pihak tertentu.

Yang lebih memprihatinkan, sebagian pemilih tidak tahu sikap yang diambil parpolnya dalam isu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), hanya 10 persen responden yang mengetahui sikap parpol yang dipilihnya.

Juga, saat isu impor beras mencuat, 94 persen responden tidak tahu sikap parpolnya tersebut. "Itu menunjukkan bahwa hubungan parpol dengan pemilih kurang accountable," (tom)

Berikut >

[ Kembali ]

### BERITA TERAKHIR

Hari Ini..

Menengok Dapur The Red Bulletin

Bus Terjun ke Sungai, 12 Penumpang

### BERITA POPULER

Waw, Beredar Adegan Mesum

Hari Ini...

Besok, Pengumuman CPNS se-Sul

## Lapsus

## Ekonomi

## JELIHIM

+ Bagir: Hakim Nakal Dipecat.

- Ayo, Yang Nakal Tunjuk Tangan.

+ Gaji Honorer Dipangkas.

- Jatuh Tertimpa Tangga.

## PENGUNJUNG

Hari ini	385
Kemarin	612
Minggu ini	3096
Bulan ini	14644
Total Pengunjung	49982

## MEDIA GROUP



## Tewas

Boeing Tawarkan Heli Chinook

Lagi-lagi Freeport Longsor

Pilot-Kopilot Adam Air Ditahan

Sisir Anggaran Departemen Teknis

Wapres: Konflik di Poso hanya

Antarpersonal

Ke Kejati, Inul Minta Pembajak Dihukum

Mati

Presiden Surati Semua Rumah

42 Anggota DPR Ajukan Protes

Kinerja Parpol Paling Buruk

Bantah Bisa Disuap

Magath Tidak Perlu Ketenaran Beckham

Lagi, Toni Gagal Penalti

Massimo Mutarelli Pahlawan

Ossasuna 2 Vs 0 Real Socieda

Tugas Berat Mantan Personel Dream

Team

Ronaldo Tersenyum Kembali

Star Mild Crushbone Digelar Lagi

Remas Dada ABG, Babak Belur

WWW.PRESIDENSBY.INFO

Keperkasaan Pria, Antara Mitos da

Prosedur Penetapan CPNS Masih I

Usai Kencan, Kanit Reskrim Tewas

Koleksi Pribadi saat Valentine

Akan Disel, Wako Prabumulih Ping

Japaness Cut, Trend Rambut 2006

PAL-TV Telurkan 20 Presenter Bar

Rumah mewah berasitektur Pranci

Menkes Kena Bogem

Desak Pemerintah Amandemen UL

Tarif Iklan Society

Didatangi Mantan Presiden Sampa

3 Pengendara Motor Tewas Digilas

Unsri

Ada Intel di dalam Apple

Dibantu Sriwijaya dan Persib



0 807 1 807 807

Bayar Tiket Online\*, bawa pulang 15 notebook  
setiap bulan & Grand Prize sebuah MPV

\*RAB, GIGA Card, Poin 12 Bt & 12 Internet Bt & 12. Periode 1 Januari - 31 Maret 2006



# Behind their strong opinion

detikNews | detikFinance | detikFood | detikHot | detiki-Net | detikSport | Foto | Indeks

Info Iklan | SMSiklan | Sepakbola | Ticket Box | newsUpdate | detikShop | Surat dari Buncit

:: Lifestyle | Cupid | Jodoh | 123 X-Fun | Iguana | boleh | mobile tren | fun dering | makan yoo ::

SELEMBUT AIR MATA

Hadir di  
14 cabang **BCA**

JANGAN CUMA  
JADI PEMBACA

## Kinerja Parpol Jeblok UU Parpol Harus Dikaji Ulang

Nurvita Indarini - detikcom

Jakarta - Sebagian masyarakat menilai kinerja partai politik (parpol) masih belum optimal. Karena itu UU 31/2002 tentang parpol harus dikaji ulang. Sebab tidak akan mungkin membangun demokrasi tanpa partai yang bekerja secara proporsional.

Demikian pendapat yang dikemukakan oleh Ketua Bidang Politik DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Hal itu disampaikannya usai diskusi *Evaluasi Pemilih atas Kinerja Dua Tahun Partai Politik* di Hotel Sari Pan Pacific, Jl MH Thamrin, Jakarta, Kamis (23/3/2006).

Menurut mantan anggota KPU ini, UU Parpol yang berkaitan dengan pasal mengenai *electoral engineering*, *electoral threshold* harus ditinjau kembali.

Dengan pengaturan pendirian partai ini, maka ke depannya partai yang terlibat dalam pemerintahan tidak terlalu banyak kendati mengusung prinsip multipartai.

PT. Berca Computel

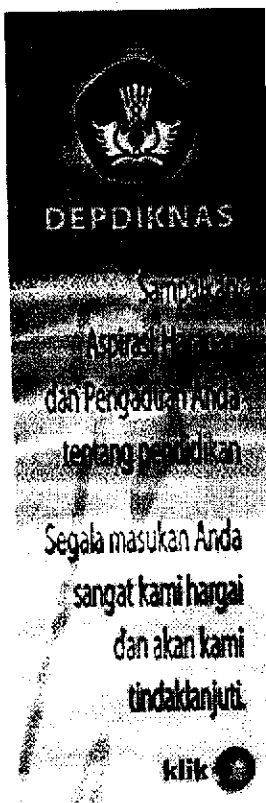
**D-Link**  
Building Networks for People

"D-Link Business  
Solutions"

Tuesday, 28 March 2006

Time : 9:00am - 2:00pm

Shangri-la Hotel Jakarta



**detikNews**

24/03/2006 11:52 WIB  
Ribuan Umat Islam Gelar  
Aksi Damai Dukung RUU  
APP Minggu

**detikNews**

24/03/2006 11:42 WIB  
Pemerintah Harus  
Jelaskan Molonya  
Jadwal RUU PA

**detikNews**

24/03/2006 11:38 WIB  
Tahanan LP Salemba  
Perang Batu

**detikNews**

24/03/2006 11:26 WIB  
Niat Nolong Ibu-Anak  
Turun Bus, Wartawan  
Dipukul Polisi

**detikNews**

24/03/2006 11:21 WIB  
PNS Jadi Anggota Parpol  
Bisa, Jadi Caleg No

"Electoral treshold yang 3% harus dinaikkan menjadi 5%. UU Parpol menjadi faktor yang menentukan dalam perubahan menuju demokrasi yang lebih baik," ujar pria ganteng ini.

Anas menambahkan, ciri demokrasi bukan berdasar jumlah partai yang banyak, tapi lebih lebih pada kinerja partai secara fungsional. Partai yang tidak terlalu banyak dalam pemerintahan akan lebih memudahkan kinerja pemerintah sehingga stabilitas pemerintahan akan menjadi lebih baik. Hal itu dikarenakan konsolidasi internal secara teknis akan lebih mudah, sehingga *sharing* kekuasaan akan lebih mantap.

Hal senada disampaikan pula oleh Wakil Sekjen DPP Partai Golkar Rully Chairul Azwar. Idealnya parpol yang terlibat pemilu cukup 5-7 saja. Namun hal ini masih belum bisa terwujud pada tahun 2009 karena masih memerlukan proses alamiah yang tidak bisa ditentukan begitu saja dengan peraturan.

"Idealnya platform partai harus ditata lagi. Jangan terjebak pada maraknya pembentukan partai hanya karena mengedepankan prinsip asal berbeda dengan pemerintah," kata Rully.

Sementara itu menanggapi pendapat yang mengatakan bahwa kinerja partai masih buruk, Anas mengatakan perlunya pula dilakukan penataan internal. Sebab ada kewenangan parpol yang belum maksimal dalam mengagregasi dan mengartikulasi kepentingan publik. Citra ini diperlihatkan oleh anggota partai yang ada di parlemen.

Untuk Pemilu Presiden 2009, Anas mengatakan, Partai Demokrat tidak bisa menghindari adanya koalisi. Sebab tidak realistis kalau tidak melakukan koalisi. Ini berbeda dengan pemilu legislatif yang setiap partai bisa berdiri sendiri.

"Koalisi pasti akan dilakukan, tapi terlalu dini untuk mengatakan kita akan berkoalisi dengan siapa. Koalisi jadi hal yang tak terhindarkan dalam pemilu presiden," demikian Anas. (nrl)

**Baca juga:**

- LSI: 52% Responden Anggap Parpol Paling Buruk Kinerjanya
- Survei LSI: 74,3% Responden Tak Setuju Bom Bunuh Diri
- LSI: Masyarakat Sangat Terbebani dalam Membeli Beras
- Gagal Suksesnya Penanganan Tsunami Pengaruhi Politik Aceh

Informasi pemasangan webtorial/Iklan,  
Hubungi bagian Iklan di infoiklan@staff.detik.com  
Telepon 021-7941177 ext.526

## SMS Iklan

**detikcom**

0 807 1 807 807

Bayar Tiket Online\* bawa pulang 15 notebook  
setiap bulan & Grand Prize sebuah MPV  
\*ATM, Credit Card, Phone Banking, Internet Banking Periode 1 Januari - 31 Maret 2006



Behind their strong opinion

detikNews | detikFinance | detikFood | detikHot | detiki-Net | detikSport | Foto | Indeks

Info Iklan | SMSiklan | Sepakbola | Ticket Box | newsUpdate | detikShop | Surat dari Buncit

:: Lifestyle | Cupid | Jodoh | 123 X-Fun | Iguana | boleh | mobile tren | fun dering | makan yoo ::

SELEMBUT AIR MATA

Hadir di  
14 cabang **BCA**

JANGAN CUMA  
JADI PEMBACA

Ingat monton F1 di Inggris langsung illi  
untuk 5 orang pemenang illi

## Arbi: Bukan UU Parpol yang Salah Tapi Elit-elitnya

Indra Subagja - detikcom

Jakarta - Partai politik kembali menuai pandangan tidak sedap dari masyarakat. Survei LSI menunjukkan 52 persen responden tidak puas dengan kinerja mereka. Atas hal ini muncul pemikiran agar UU Parpol dikaji ulang. Namun wacana tersebut malah dianggap tidak perlu dan mengada-ngada.

"Masalahnya bukan pada UU-nya, pengkajian itu tidak ada gunanya. Tidak demokratis dengan mengganti UU. Masalahnya pada sikap elit partai, mereka hanya mengurus nafsu berkuasa," kata pengamat politik UI Arbi Sanit, saat dihubungi detikcom, Jumat (24/3/2006).

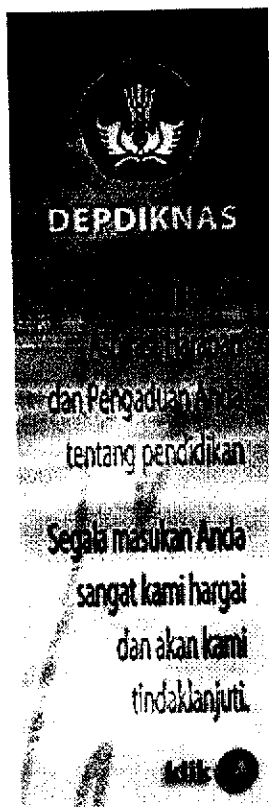
Menurutnya, elit-elit politik yang mendirikan partai itulah yang tidak mau mengabdikan kepada masyarakat, sehingga sistem partai menjadi rusak.

**PT. Berca Computel**

**D-Link**  
Building Networks for People

**D-Link Business**

Tuesday, 28 March 2006  
Time : 9:00am - 2:00pm  
Shangri-la Hotel Jakarta



**detikNews**  
24/03/2006 11:52 WIB  
Ribuan Umat Islam Gelar Aksi Damai Dukung RUU APP Minggu

**detikNews**  
24/03/2006 11:42 WIB  
Pemerintah Harus Jelaskan Molornya Jadwal RUU PA

**detikNews**  
24/03/2006 11:38 WIB  
Tahanan LP Salemba Perang Batu

**detikNews**  
24/03/2006 11:26 WIB  
Niat Nolong Ibu-Anak Turun Bus, Wartawan Dipukul Polisi

**detikNews**  
24/03/2006 11:21 WIB  
PNS Jadi Anggota Parpol Bisa, Jadi Caleg No

Jadi tidak hanya sekedar menggantungkan pada penggantian UU 31/2002 tentang parpol semata.

"UU tidak memperbaiki negara. UU bisa dirongrong elit yang berkuasa. Tapi sistem operasional di lapangan yang menentukan," ujarnya.

Arbi melihat, akibat ulah elit-elitnya seluruh partai sudah rusak, hal itu bisa dilihat dari sumbangan apa yang telah mereka berikan kepada masyarakat, yang kebanyakan hanya ucapan saja.

"Sekarang ini partai seperti tumpukan sampah tidak berguna. Idealnya ada dua partai kuat saja yang berkuasa saling bergantian memperebutkan suara rakyat pada pemilu," tuturnya.

Dia menyarankan agar UU Parpol direvisi dengan menerapkan sistem distrik pada pemilu. Hitungannya, 1 distrik untuk 1 kursi. Dengan demikian otomatis partai-partai yang banyak sekarang ini mau tidak mau akan bergabung.

"Saat ini dari 12 negara di Asia Pasifik, hanya 2 yang menggunakan sistem proporsional yakni Indonesia dan Kamboja, Anda lihat hasilnya seperti apa," sindir Arbi. (ahm)

**Baca juga:**

- Kinerja Parpol Jeblok  
UU Parpol Harus Dikaji Ulang
- LSI: 52% Responden Anggap Parpol Paling Buruk Kinerjanya
- Survei LSI: 74,3% Responden Tak Setuju Bom Bunuh Diri
- 5 Parpol Nasionalis Tidak Bahas Strategi Pemilu 2009

Informasi pemasangan webtorial/iklan  
Hubungi bagian iklan di [infoiklan@staff.detik.com](mailto:infoiklan@staff.detik.com)  
Telepon 021-7941177 ext.526

## SMS Iklan

apapun profesi anda, anda bisa kaya asalkan anda dapat mengelola keuangan anda. dapatkan panduannya di [www.keuanganpribadi.com](http://www.keuanganpribadi.com). (6281932462579)

**Lihat**

**Pasang**





Jumat, 24 Mar 2006,

### Kinerja Parpol Paling Buruk

JAKARTA - Setelah dicap sebagai lembaga terkorup oleh Transparency International Indonesia, partai politik kembali mendapatkan predikat sebagai lembaga yang berkinerja terburuk dibandingkan lembaga lain. Predikat itu merupakan kesimpulan Lembaga Survei Indonesia (LSI) setelah melakukan survei hingga Maret 2006.

Dari hasil survei tersebut diketahui, setelah dua tahun memilih, sejak Pemilu 2004, publik secara umum menilai bahwa fungsi intermediasi dan accountability partai sangat rendah. "Kedekatan pemilih dengan parpol juga semakin jauh," ujar Direktur Eksekutif LSI Saiful Mujani saat diskusi Evaluasi Pemilih atas Kinerja Dua Tahun Partai Politik di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, kemarin.

Survei LSI tersebut dilakukan secara nasional melalui wawancara tatap muka dengan 1.200 responden. Survei dilakukan tujuh kali sejak April 2004 hingga Maret 2006. Margin of error di setiap survei sekitar 2,6 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Dibandingkan lembaga lain, parpol juga menempati peringkat terbawah dalam penilaian kinerja oleh publik. Presiden dinilai baik oleh 71 persen responden. Lembaga kepolisian (69 persen) menempati posisi kedua dan berikutnya adalah DPR (52 persen). Parpol menempati posisi buncit.

"Selisih antara parpol dan DPR sedikit. Sebab, kedua lembaga itu mempunyai keterkaitan. Hanya, publik lebih mudah melihat kinerja DPR dibandingkan parpol," jelas Saiful.

Khusus untuk parpol, 48 persen responden menyatakan bahwa kinerja parpol baik. Angka itu dinilai kurang dari separo responden. Angka itu dinilai kurang, apalagi dibandingkan ukuran relatif lembaga lain. "Idealnya, minimal di atas 50 persen," ujarnya.

Apa alasan para pemilih, sehingga menilai kinerja parpol belum baik? Sebagian besar responden berpendapat, para pemimpin parpol umumnya hanya memikirkan kepentingan masing-masing. Tidak banyak yang memikirkan rakyat yang memilih mereka dalam pemilu. Ada juga yang berpendapat, parpol hanya melayani kepentingan pihak tertentu.

Yang lebih memprihatinkan, sebagian pemilih tidak tahu sikap yang diambil parpolnya. Misalnya, dalam isu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), hanya 10 persen responden yang mengetahui sikap parpol yang dipilihnya.

Juga, saat isu impor beras mencuat, 94 persen responden tidak tahu sikap parpolnya terkait isu tersebut. "Itu menunjukkan bahwa hubungan parpol dengan pemilih kurang accountable," tegasnya. (tom)

<<: Kembali

RUBRIK	
Berita Utama	
Internasional	
Opini	
Visite	
Politika	
Edisi Mingguan	
RUBRIK LAIN	
Pro Otonomi	
Riset & Polling	
Laporan Khusus	
Edukasi	
Golf	
Ulasan Ekonomi	
Kajian	
Sosok	
Nouvelle	
DETEKSI	
Deteksi Surabaya	
Deteksi Jakarta	
Movies	
Otomotif	
De-Style	
Aiduru	

Jumat, 24 Maret 2006

**SUARA KARYA**

| politik | hukum | ekonomi | bisnis | metropolitan | nusantara | olahraga | internasional | hiburan

**Berita Lainnya**

**PERILAKU MASYARAKAT**  
Wapres: Jauhkan Bangsa Ini dari Kebrutalan

**OASE**  
Dicari Pemimpin Plus  
Oleh: Anis Sholeh Ba'asyin  
Pemerhati Masalah Sufisme  
**PEMERINTAHAN**  
Lembaga  
Kepresidenan Lemah

**SURVEI**  
Golkar Menangi  
"Pemilu" Versi LSI

**REKRUTMEN CPNS**  
Sistem  
Penyelenggaraan  
Bobrok

**DIPLOMASI**  
DPR Kecam  
Pemberian Suaka  
kepada 42 Warga  
Papua

**PERTEMUAN INFORMAL**  
Ketua DPR Sesali  
Presiden

**KPUD**  
Mendagri Diminta  
Sahkan  
Pilkada Tapteng

**PASPOR BIOMETRIK**  
Pelayanan Kembali  
Normal April

**PEMBANGUNAN SDM**  
Pemerintah Harus  
Ubah Paradigma

**MOU HELSINKI**  
Penyelesaian RUU PA  
Meleset dari Target

**SISTEM KEPARTAIAN**  
Parpol Peserta Pemilu  
Harus Dibatasi

arsip

**RENOVASI KBRI**  
Dubes Korsel  
Mengaku

## **SURVEI** **Golkar Menangi** **"Pemilu" Versi LSI**

Jumat, 24 Maret 2006

**JAKARTA (Suara Karya):** Bila pemilihan umum (pilkada) digelar hari ini, Partai Golkar niscaya tampil sebagai pemenang.

Menurut hasil penelitian Lembaga Survei Indonesia (LSI) Maret 2006, Golkar memperoleh dukungan tertinggi (17,5 persen), Partai Demokrat 13,8 persen, PDIP 11,4 persen. Mereka adalah kelompok tiga besar.

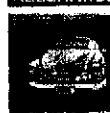
Menurut survei pada tahun lalu, semula posisi tertinggi dipegang Partai Demokrat dan PDIP. "Berdasarkan survei Desember 2005, Demokrat memperoleh dukungan 16,5 persen, Golkar 14,2 persen, PDIP 13,8 persen," kata Direktur Eksekutif LSI Saiful Mujani di Jakarta.

Januari 2006, kata Mujani, suara responden untuk Golkar menjadi 17,7 persen, Demokrat 14,4 persen, dan PDIP 12,1 persen. April 2004-Maret 2006, LSI telah melakukan tujuh survei dengan rata-rata sebanyak 1.200 orang. Sementara margin kesalahan rata-rata kurang lebih 2,6 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen menggunakan multistate random sampling sebagai metode. Sementara metode wawancara dilakukan dengan tatap muka.

Berdasarkan survei terakhir (Maret 2006), LSI mengklasifikasi responden yang termasuk dalam kelompok papan atas terdiri dari Golkar (17,5 persen) dan PDIP (11,4 persen). Menyusul parpol papan tengah yang dihuni PKB (6,1 persen). Sementara dalam kelompok papan bawah yang berada di zona degradasi atau batas electoral threshold terdapat PAN (2,7 persen). Beberapa partai lain rata-rata meraih dukungan 1 persen dengan undecided 35 persen.

Wakil Sekjen DPP Partai Golkar Rully Chairul Azwar mengatakan, hasil survei LSI ini menunjukkan bahwa partai harus lebih meninjau strategi. "Meski bagus, bagi kami ini belum membanggakan. Dukungan kami masih di bawah perolehan suara yang kami raih pada Pemilu 2004, 21 persen," ujarnya.

Soal sikap pemilih, riset yang dilakukan LSI sejak April 2004-Maret 2006 menyimpulkan, 48 persen pemilih merasa partai harus memperjuangkan kepentingan politik mereka. Kemudian 28 persen responden mengaku tidak tahu, dan 24 persen menilai kinerja partai.



Tak Tahu PT Sun Hoo

KUNJUNGAN KENEGARAAN  
Presiden Berharap  
Singapura

Tingkatkan Investasi

ANALISIS KUNJUNGAN RICE  
AS Ingin Bentuk Poros  
New Delhi-Jakarta-  
Washington?

KUNJUNGAN MENLU AS  
Pemerintah Diminta  
Bersikap Seajar

RENOVASI KBRI SEOUL  
Pernyataan Surat  
Palsu

Tidak Meyakinkan

KUNJUNGAN RICE  
Momentum Tepat  
untuk  
Buka Mata AS

arsip

### Wajah

Faisal Basri

Bursah Zarnubi

Laila Freivalds

Sri Mulyani Indrawati

Sugiharto

Roh Moo-Hyun

arsip

### Kilas Politik

DARI ISTANA

Presiden Dukung  
Program Pencatatan  
Kelahiran

DARI SENAYAN

Agung Usulkan  
Reformasi

Program Pendidikan

DARI ISTANA

Presiden Resmikan  
Proyek  
Pembangunan di  
Ambon

DARI SENAYAN

Tjatur Sapto Edy  
Luncurkan  
Buku Pengalamannya

DARI ISTANA

Presiden Minta AS  
Tingkatkan  
Kerja Sama Berantas  
Flu Burung

Meski demikian, kinerja parpol dinilai masih berada di publik lain seperti presiden (71 persen), polisi (69 persen persen). Hampir semua pemilih tidak tahu sikap dan k tentang dua isu penting, yaitu kenaikan harga bahan baka dan impor beras.

Dalam survei yang dilakukan di awal 2006, hanya se dari pemilih yang punya hubungan psikologis secara positif c

LSI memaparkan, ada 4 kombinasi antara fungsi ir hubungan psikologis massa pemilih dengan partai; yakni loyal, rasional, dan teralienasi (terasing). Di antara tipe in adalah tipe terasing sebanyak 45 persen.

"Ini adalah tipe yang paling buruk tentang hubungan massa pemilih. Proporsi yang besar dalam hal ini mengind yang kecewa terhadap parpol. Ini merupakan potensi l sistem kepartaian," kata Saiful.

Di antara 7 parpol besar yang punya proporsi paling banyak adalah Partai Golkar dan PAN. Tipe rasional paling Partai Demokrat. Sedangkan proporsi tipe loyal identik de tipe terasing terbanyak adalah PPP. Padahal yang ideal dari adalah kombinasi dari berbagai tipologi. (Yudhiarma)

Politik | Hukum | Ekonomi | Metropolitan | Nusantara | Internasi  
Humor | Opini | About Us

Copy Right ©2000 Suara Karya Online  
Powered by Hanoman-i

# - SINAR HARAPAN -

SELASA, 28 Maret 2006

Hasil Survei LSI

## Masyarakat Aceh di Bekas Basis GAM Masih Takut

Jakarta - Masyarakat di wilayah yang pernah menjadi basis Gerakan Aceh Merdeka (GAM) masih dihantui rasa takut untuk ikut berorganisasi karena ada upaya penangkapan semena-mena oleh aparat keamanan. Pengalaman intimidasi, baik dari pihak militer RI maupun pihak GAM di masa lalu, membuat warga di wilayah tersebut masih ragu perdamaian di Aceh akan menghasilkan kebebasan untuk menyampaikan pendapat.

Demikian temuan hasil survei Lembaga Survei Indonesia mengenai perdamaian dan politik lokal di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), yang disampaikan oleh peneliti LSI Anies Baswedan, di Jakarta, Selasa (28/3) pagi. Survei tersebut dilakukan pada tanggal 15 sampai 20 Maret 2006 terhadap 1.015 responden dengan melakukan wawancara tatap muka.

Anies menjelaskan, saat ini rasa aman dari konflik bersenjata sangat dirasakan masyarakat NAD, tetapi rasa aman secara politis masih cukup kecil.

"Ini menunjukkan bahwa perdamaian yang ada baru mencakup the absent of conflict, bukan the presence of freedom ataupun the presence of justice," kata Anies.

Menurut temuan LSI, 76 responden menyatakan keamanan di Aceh sangat baik, 51 persen menyatakan pene-

gakan hukum berjalan sebagaimana mestinya. Sementara itu, hanya 22 persen rakyat NAD yang menyatakan kondisi ekonomi saat ini berjalan lancar. Hal itu terjadi hampir merata di seluruh wilayah NAD.

"Mayoritas warga memandang ada kemajuan yang positif dari perdamaian di Aceh. Namun, kesulitan ekonomi sangat dirasakan, terutama karena harga kebutuhan barang pokok yang sangat mahal dan susah mencari lapangan pekerjaan," ujarnya.

Menurutnya, sekalipun keamanan yang terjadi akibat proses MoU namun masih ada keraguan di masyarakat bahwa GAM benar-benar tidak akan memperjuangkan pemisahan Aceh dari NKRI. Hanya sekitar separuh warga Aceh (48 persen) yang yakin bahwa GAM akan menghentikan perjuangan, memisahkan diri dari NKRI. Bahkan, keraguan itu tampak jelas di wilayah bekas GAM, di mana hanya 4 dari 10 warga Aceh yang menyatakan perjuangan GAM untuk memisahkan diri telah berakhir.

Pemerintah RI dipandang telah berhasil menjalankan perannya di Aceh (85 persen untuk merukunkan jam dengan WNI lainnya). Lebih dari (77 persen) warga NAD menilai kinerja pemerintah Indonesia sesuai dengan kesepakatan MoU Helsinki.

(inno jemabut)



Selasa, 28 Maret 2006

POLKAM  
HUKUM & KRIMINAL  
EKONOMI  
SOSIAL BUDAYA  
OLAHRAGA  
METROPOLITAN  
NUSANTARA  
INTERNASIONAL  
UMUM

BREAKING NEWS  
HEADLINE NEWS  
METRO PAGI  
METRO SIANG  
METRO HARI INI  
METRO MALAM  
TOP NINE NEWS  
METRO SPORTS  
MARKET REVIEW

DO YOU KNOW ?  
PRESS RELEASE

## PENCARIAN BERITA

→ Programs → Aktual  
Search News

## BERITA AKTUAL

## HASIL SURVEI LSI, GAM DIYAKINI TIDAK MEMPERJUANGKAN KEMERDEKAAN

28/03/2006 15:12 - Polkam/Headline News



Metrotvnews.com, Jakarta: Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dinilai tidak akan lagi memperjuangkan pemisahan Aceh dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Demikian hasil survei terbaru Lembaga Survei Indonesia yang diumumkan di Jakarta, Selasa (28/3). Survei ini terkait evaluasi perdamaian dan politik lokal di Nangroe Aceh Darussalam.

Sebanyak 48 persen responden di Aceh sangat yakin GAM tidak akan lagi memperjuangkan kemerdekaan Aceh dari NKRI. Sedangkan 52 persen responden merasa GAM masih memperjuangkan pemisahan Aceh dari NKRI. Di kabupaten-kabupaten yang menjadi basis GAM, 43 persen responden menilai GAM tidak akan lagi memperjuangkan pemisahan Aceh dari NKRI. Sedangkan 57 persen responden merasa GAM masih memperjuangkan pemisahan Aceh dari NKRI. Sementara 53 persen warga di kabupaten atau kota yang bukan bekas basis GAM sangat meyakini GAM tidak lagi akan memperjuangkan pemisahan Aceh dari NKRI. (\*/BEY)

## BERITA LAINNYA:

- [MK Mengabulkan Judicial Review UU PPTK](#)
- [Hari Ini Pemilu Parlemen Israel](#)
- [Indonesia Menunda Penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Australia](#)
- [Presiden SBY Menerima Kunjungan Parlemen Cina](#)
- [Farrakhan Menyerukan Penggantian Pemerintahan AS](#)

**SERVICE:** **XML** Add RSS Headlines

Copyright © 2005 Metro TV. All rights reserved.

Comments and suggestions please email [webmetro@metrotvnews.com](mailto:webmetro@metrotvnews.com)

DIGITAL LIFE  
**detikcom**

0807 1807 807  
www.detik.com

**Bayar Tiket Online\*, bawa pulang 15 notebook  
setiap bulan & Grand Prize sebuah MPV**

\*ATM, Credit Card, Phone Banking, Internet Banking Periode 1 Januari - 31 Maret 2006



**Lies a powerful reference**

**ukum**  
online.com  
*Legal Database*

detikNews | detikFinance | detikFood | detikHot | detiki-Net | detikSport | Foto | Indeks  
Info Iklan | SMSiklan | Sepakbola | Ticket Box | newsUpdate | detikShop | Surat dari Buncit  
:: Lifestyle | Cupid | Jodoh | 123 X-Fun | Iguana | boleh | mobile tren | fun dering | makan yoo :

**Hubungi**  
**69-888**

Ingin nonton F1 di Inggris langsung !!  
untuk 5 orang pamanag !!

## 6 Dari 10 Warga Aceh Yakin GAM Tetap Ingin Merdeka

Nurfajri Budi Nugroho - detikcom

**Jakarta** - Meski telah damai, ternyata banyak warga Aceh yang tidak percaya Gerakan Aceh Merdeka (GAM) akan berhenti memperjuangkan kemerdekaan agar lepas dari Indonesia.

Demikian hasil penelitian Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang disampaikan peneliti senior LSI Anis Baswedan dalam jumpa pers, di Hotel Sari Pan Pacific, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Selasa (28/3/2006).

LSI melakukan penelitian pada 8-18 Maret terhadap 1.015 responden yang dilaksanakan di seluruh daerah di Aceh. Penelitian dilakukan untuk mengetahui perkembangan Aceh 6 bulan pasca MoU Helsinki.

Hasil penelitian diketahui, 7 dari 10 masyarakat Aceh mengatakan ada kemajuan perdamaian antara GAM dengan pemerintah pasca MoU. Namun 6 dari 10 masyarakat Aceh masih yakin GAM akan tetap memperjuangkan kemerdekaannya.

**PT. Berca Computel**

**D-Link**  
Building Networks for People

Tuesday, 28 March 2006  
Time : 9:00am - 2:00pm  
Shangri-la Hotel Jakarta



Segala masukan Anda  
sangat kami hargai  
dan akan kami  
tindaklanjuti.

klk

#### detikNews

28/03/2006 16:01 WIB  
Pemberian Visa Australia  
ke 42 Warga Papua Hal  
Manusiawi

#### detikNews

28/03/2006 15:52 WIB  
Korban HAM & 8 LSM  
Ajukan Uji Materi UU  
KKR

#### detikNews

28/03/2006 16:50 WIB  
SBY Minta Anggaran  
Daerah Tidak untuk Beli  
Barang Konsumtif

#### detikNews

28/03/2006 15:44 WIB  
Komnas Desak  
Pemerintah Bentuk  
Peradilan HAM Aceh

#### detikNews

28/03/2006 15:30 WIB  
Dephan Akan Bangun  
Pos Perbatasan Terpadu  
di Papua

"Meski mereka merasakan perdamaian, namun tak semuanya yakin GAM tidak lagi ingin merdeka," kata Anis.

Ketidakpercayaan kepada GAM tampak makin jelas ketika dilakukan analisa berdasarkan wilayah. Di wilayah bekas GAM, tercatat hanya 4 dari 10 orang Aceh di wilayah itu yang menyatakan yakin perjuangan GAM untuk memisahkan diri dari NKRI telah berakhir.

Dalam survei tersebut juga ditemukan 85 persen warga Aceh menyatakan pemerintah telah berhasil mendamaikan GAM dengan warga Aceh lainnya. Sementara lebih dari 77 persen menilai baik kinerja pemerintah dalam menindaklanjuti MoU Helsinki. "Ini harus diapresiasi," tandas Anis.

LSI juga menemukan masih adanya ketakutan di masyarakat untuk mengekspresikan aspirasi politik secara langsung. Hal tersebut disebabkan oleh pengalaman intimidasi, baik dari pemerintah RI maupun GAM selama ini.

"Hanya 53 persen yang merasa bebas mengartikulasi aspirasinya, banyak dari mereka yang masih ragu perdamaian akan menghasilkan kebebasan menyampaikan pendapat," terang peneliti LSI itu.

Pandangan tentang kebebasan berpolitik terlihat sangat berbeda antara wilayah yang pernah jadi basis GAM dan yang bukan. Masyarakat di wilayah basis GAM masih dihantui rasa takut untuk ikut berorganisasi dan takut ada penangkapan semena-mena oleh aparat. (iy)

#### Baca juga:

- Rumah Anti Cemburu untuk Aceh
- Eks TNA:  
Grogri Senjata Diganti Pulpen
- Bakhtiar Abdullah, Jubir GAM yang Belum Berminat Jadi WNI
- Melongok 'Sarang' GAM Nan Megah

Informasi pemasangan webtorial/iklan  
Hubungi bagian Iklan di [infoiklan@staff.detik.com](mailto:infoiklan@staff.detik.com)  
Telepon 021-7941177 ext.526

## SMS Iklan

Dijual 10ruko baru, di Plumpang Raya, Jakut. Lt/Lb 120/204, HGB.3 lantai, parkir luas, Lks ramai & strategis. [www.rukoplumpang.cjb.net](http://www.rukoplumpang.cjb.net) - Ridwan (622170188817)

Like Share



GOL 2006

FLEXI detik.com  
[www.detik.com](http://www.detik.com)



# Aceh Dambakan Partai Lokal

Pemilihan kepala daerah diyakini tanpa tekanan.

**JAKARTA** — Hasil penelitian Lembaga Survei Indonesia (LSI) di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada 8-18 Maret menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat di sana mendambakan berdirinya partai lokal.

"Dari 77 persen suku Aceh yang disurvei, 67 persen di antaranya menyatakan setuju dan sangat setuju adanya partai lokal di sana," kata peneliti utama

LSI, Anies Baswedan, saat memaparkan hasil survei tentang "Perdamaian dan Politik Lokal di Nanggroe Aceh Darussalam" kemarin.

Survei mengambil sampel 1.015 responden dengan metode *multistage random sampling*. Sementara itu, *margin of error* sekitar 3,1 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Dalam konteks pemilihan kepala daerah di sana, Anies melanjutkan, 64 persen responden menyatakan setuju adanya calon independen untuk gubernur, bupati, dan wali kota.

Sebanyak 62 persen masyarakat Aceh juga yakin pemilihan kepala daerah langsung akan berlangsung tanpa tekanan. Meski demikian, menurut Anies, di wilayah bekas basis Gerakan Aceh Merdeka, separuh responden atau 53 persen yakin masih akan ada tekanan. "Ini terjadi karena trauma masa lalu," katanya.

Menanggapi hasil survei, Ketua Panitia Khusus Pembahas Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Aceh Ferry Mursyidan Baldan tidak melihat permintaan di-  
legalkannya keberadaan

partai politik lokal sebagai upaya pengeksklusifan daerah Aceh.

Data itu juga merepresentasikan harapan akan masa depan politik di wilayah yang pernah di tetapkan sebagai daerah operasi militer tersebut. "Partai politik lokal dianggap sebagai instrumen untuk membangun harapan politik masa depan," ujar politikus Partai Golkar ini.

Tentang kondisi keamanan di Aceh, 76 persen responden menyatakan sudah baik dan 73 persen menyatakan telah terjadi kemajuan dalam pelaksanaan per-

damaian antara GAM dan pemerintah, serta 61 persen yakin kedua pihak betul akan berdamai dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sementara itu, 48 persen warga Aceh yakin GAM akan menghentikan perjuangan memisahkan diri dari Republik Indonesia. Keraguan itu, menurut Anies, makin jelas ketika dianalisis berdasarkan wilayah bekas GAM. "Hanya empat dari sepuluh orang Aceh di wilayah itu menyatakan yakin GAM tidak akan memisahkan diri," ujarnya. ● HUGH RACHMADY



# Separuh Lebih Rakyat Aceh Ragukan GAM

Teuku Kamaruzzaman: Eks GAM Berkomitmen pada MOU Helsinki

JAKARTA, KOMPAS — Survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia atau LSI pada pertengahan Maret mendapatkan data, lebih dari separuh rakyat Aceh masih meragukan Gerakan Aceh Merdeka benar-benar tidak akan memperjuangkan pemisahan Aceh dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hasil survei tersebut dipresentasikan peneliti utama LSI, Anies Rasyid Baswedan, Selasa (28/3). Tampik sebagai penanggap adalah Ketua Panitia Khusus RUU Pemerintahan Aceh Ferry Mursyidan Baldan (Fraksi Partai Golkar, Jawa Barat II) dan anggota Pansus Ahmad Farhan Hamid (Fraksi Partai Amanat Nasional, Aceh I).

Survei LSI menunjukkan, hanya 48 persen rakyat Aceh yang sangat atau cukup yakin GAM tidak akan lagi memperjuangkan aspirasi untuk memerdekakan diri. Bahkan di wilayah yang me-

rupakan basis GAM, hanya 43 persen saja yang menyatakan yakin bahwa perjuangan GAM untuk memisahkan diri dari Indonesia telah berakhir.

Menurut Anies, sampel dari survei tersebut sebanyak 1.015 orang yang dipilih secara acak dari wilayah di Aceh. Survei dilakukan sepanjang 8-18 Maret 2006. Anies menyebutkan, waktu yang akan membuktikan apakah kemudian GAM benar-benar akan menurukan upayanya melepaskan diri dari Indonesia atau tidak.

Sekalipun masih meragukan komitmen GAM, 73 persen responden merasakan kemajuan pelaksanaan perdamaian antara GAM dan Pemerintah Indonesia. "Rakyat Aceh masih meragukan apakah perdamaian akan langgeng," kata Anies. Secara spekulatif, hal itu terjadi karena GAM tidak sepenuhnya dipercaya akan menghapus keinginannya untuk memisahkan diri dari Indonesia. GAM masih akan memperjuangkan keinginannya, namun hanya bersalin strategi dari perjuangan bersenjata ke perjuangan lewat diplomasi.

Mantan juru runding GAM Teuku Kamaruzzaman di Banda Aceh saat dihubungi lewat telepon mengatakan, mesti melihat dulu hasil survei LSI tersebut untuk berkomentar utuh. "Apakah yang terjadi di Aceh saat ini adalah proses yang terus berjalan. Wajar saja jika masyarakat Aceh

masih meraba-raba arah proses yang terjadi saat ini," katanya. Menurut dia, hal itu menjadikan survei LSI tersebut bisa memberikan kesimpulan yang masih surmir. Pihak eks GAM, katanya, tetap berkomitmen pada nota kesepahaman Helsinki yang menempatkan Aceh sebagai bagian NKRI. Selama ini tuntutan merdeka hanya sebuah jembatan untuk menjadikan rakyat Aceh yang menjamin keamanan, keadilan, dan kesejahteraannya. "Kalau itu bisa dicapai dengan cara lain, dengan UU Pemerintahan Aceh, untuk apa lagi menuntut merdeka?" kata Kamaruzzaman.

Sementara itu, Farhan Hamid menyebutkan, pimpinan eks GAM selalu menyatakan bahwa pihaknya menaati nota kesepahaman Helsinki. RUU Pemerintahan Aceh juga diharapkan bakal menjadi embrio kelangsungan perdamaian di Aceh. (DIK)

SURVEI LSI

## Mayoritas Rakyat Aceh Dambakan Parpol Lokal

**JAKARTA (Media):** Survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) di Aceh dari 8 hingga 18 Maret lalu mengungkapkan mayoritas masyarakat mendambakan berdirinya partai lokal.

"Dari 77% suku Aceh yang disurvei, 67% di antaranya menyatakan mereka setuju dan sangat setuju adanya partai lokal di sana," ujar peneliti utama Lembaga Survei Indonesia Anies Baswedan pada acara Dialog Perdamaian dan Politik Lokal di Nanggroe Aceh Darussalam, di Jakarta, kemarin.

Dalam konteks pemilihan kepala daerah, 64% responden menyatakan setuju adanya calon independen untuk gubernur, bupati, dan wali kota. Berdasarkan survei yang dilakukan, sebanyak 57% pernah mendengar kalau pemilihan kepala daerah nanti akan dilakukan secara langsung.

Menanggapi survei LSI itu, Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Aceh Ferry Mursyidan Baldan, sebagai salah seorang pembicara dalam acara itu, mengatakan data itu merepresentasikan harapan akan masa depan politik di wilayah yang pernah ditetapkan sebagai daerah operasi militer tersebut. "Partai politik lokal dianggap sebagai instrumen membangun harapan politik masa depan," ujarnya.

Ferry tidak melihat permintaan untuk dilegalkannya keberadaan partai politik lokal sebagai salah satu upaya pengeksklusifan daerah Aceh. "Ini merupakan kebutuhan lokal masyarakat di sana," ujar politikus Partai Golkar itu.

Sementara itu, terkait dengan proses damai antara pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), rakyat Aceh masih ragu terhadap perjuangan GAM untuk tetap berada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Menurut Anies, hanya separuh rakyat Aceh yang meyakini GAM akan menghentikan perjuangan untuk memisahkan diri dari NKRI, yaitu sebesar 48%.

Ini berarti, cuma 4 dari 10 orang Aceh yang benar-benar yakin bahwa perjuangan GAM untuk memisahkan diri dari NKRI telah berakhir. Survei tentang loyalitas GAM ini dilakukan di kabupaten/kota bukan basis GAM dan kabupaten bekas basis GAM yang meliputi Aceh Timur, Aceh Besar, Pidie, Bireuen, dan Aceh Utara. (\*P-2)

## Masyarakat Aceh Sambut Perdamaian

JAKARTA — Mayoritas rakyat Aceh menyambut baik perdamaian dan tak ingin konflik kembali terulang. Namun kurang dari separuh rakyat Aceh yang yakin bahwa GAM tak akan memperjuangkan kemerdekaan.

Itulah salah satu kesimpulan hasil penelitian Lembaga Survei Indonesia (LSI) terhadap 1.015 warga Aceh. Mereka disurvei pada 8-18 Maret 2006, menggunakan metode *multi stage random sampling*, di semua kabupaten/kota di Aceh. Survei itu memiliki *margin of error* tiga persen, pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Peneliti Senior LSI, Anis Baswedan, mengatakan di kabupaten bekas basis GAM, hanya empat dari 10 orang yang menganggap perjuangan kemerdekaan sudah berhenti. "Siapa sanya yakin GAM masih berjuang merdeka," kata Anis, kemarin.

Menurut survei LSI, keyakinan bahwa GAM telah berhenti menuntut kemerdekaan hanya dianut oleh 43 persen warga di kabupaten bekas basis GAM, 53 persen warga di kabupaten bukan bekas basis GAM, dan 48 persen warga seluruh Aceh. Sementara jumlah warga yang tak mempunyai pendapat sangat sedikit.

Tapi anggota DPR, Ahmad Farhan Hamid, menjamin GAM tak lagi menuntut kemerdekaan atau meneruskan perjuangan bersenjata. ■ rto

# Acehnese unsure peace will last: Poll

Hera Diani

*The Jakarta Post/Jakarta*

**S**even months after the government and Free Aceh Movement (GAM) signed a peace deal, the Acehnese say they are feeling more secure but many still worry the accord could break down at any time, a survey says.

The poll of 1,015 people in Aceh this month by the Indonesian Survey Institute (LSI) revealed that 76 percent of the sample rated the security situation in Aceh from good to excellent.

Nearly 90 percent of those surveyed also rated the performance of the Aceh Monitoring Mission (AMM) and the Indonesian government in keeping the peace from good and excellent.

But while security got top marks, the Acehnese were far more downbeat about their living standards.

Around 76 percent said life had gotten tougher since the peace deal, blaming the government for the soaring prices of basic commodities and high unemployment.

Most Acehnese are also

still afraid to talk about politics, especially those living in areas which were former GAM strongholds. And more than half said they were still afraid of being arrested for no reason by security forces, while around 50 percent were unsure if GAM had given up its secessionist ambitions.

Asked about the planned regional elections for the province, 43 percent of Acehnese said they were not aware of any direct elections, with the lack of knowledge highest in rural areas.

However, a clear majority of 67 percent of those surveyed supported the establishment of local political parties, and 64 percent backed the idea of fielding independent candidates for gubernatorial and regional posts.

In traditional GAM areas, about half the population worried they would be coerced into voting for particular candidates.

LSI chief researcher Anis Baswedan said the survey showed peace in Aceh was currently about "the absence of conflict" rather than "the presence of free-

dom" or justice.


"The Acehnese are still worried because several peace agreements signed before the one signed in Helsinki in August last year have failed," he said Tuesday.

Legislator Ferry Mursyidan Baldan, who chaired the House of Representatives special committee that helped formulate the Aceh administration bill, said the survey showed the Acehnese wanted to be involved more in the political process, which was why they supported the establishment of local parties.

Regional elections in Aceh were initially scheduled for April but are likely to be delayed until after the Aceh governing bill is passed.

Ferry blamed people's ignorance of the planned local elections on a sluggish Independent Election Monitoring Committee (KIPP).

"What the KIPP has done so far is insignificant. Data on voters is not yet available. All this, when the upcoming elections are likely to be huge because they will involve 18 regencies; the whole province," he said.

**KOMPAS CYBER MEDIA**

**Nggak Cuma Lewat Internet**

**Mau tahu tentang film terbarunya?**  
**TYPHOON**

**ebay** **sell to** **and get R**

[Ad Info](#) | [About](#)



Updated: Selasa, 28 Maret 2006, 12:33 WIB

**NAS**

Rubrik  
Hiburan  
Kesehatan  
Metropolitan  
Makan & Plesiran  
Nasional  
Olah Raga  
Otomotif  
Saham & Pasar Uang  
Sains & Teknologi  
Selular  
Wanita  
Komunitas

Pilih

Kolom

Pilih

Surat Kabar

Pilih

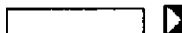
Majalah

Pilih

Radio

Pilih

CART



## LSI: Aceh Aman tapi Kondisi Ekonomi Buruk

Laporan : Heru Margianto

Jakarta, KCM

Bagaimanakah kondisi Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD) enam bulan sesudah nota kesepahaman (MoU) Helsinki ditandatangani? Jawabannya, Aceh telah aman tapi kondisi ekonomi buruk. Itulah yang dirasakan masyarakat di sana.

Mereka menilai kesepahaman Helsinki berjalan baik di lapangan. Sehingga, rasa aman dari konflik bersenjata benar-benar dirasakan di provinsi tersebut.

Namun begitu, masyarakat di Aceh mengeluh soal buruknya kondisi ekonomi. Harga-harga barang meningkat tajam

[Kirim Teman](#) | [Print Artikel](#)

### Berita Terkait:

- [Proses Perdamaian di Aceh Harus Dilihat Objektif](#)
- [LSM: RUU PA Jawaban Persoalan Aceh](#)
- [Tugas AMM Selesai 15 Juni 2006](#)

**IN  
BEA  
te**

sementara pekerjaan sulit didapat.

Demikian riset Lembaga Survei Indonesia (LSI) tentang perdamaian dan politik lokal di NAD. Hasil survei itu dipaparkan peneliti utama LSI Anies Baswedan kepada pers di Hotel Sari Pan Pacific, Selasa (28/3).

Survei yang dilakukan pada 8 sampai dengan 18 Maret 2006 di NAD mengambil sampel 1015 responden dengan metode *multistage random sampling*. Sementara, *margin of error* dari survei tersebut kurang lebih 3,1 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

#### **Sebatas rasa aman**

Lebih lanjut, Anies mengungkapkan 76 persen masyarakat NAD menyatakan kondisi keamanan di provinsi itu baik. Tapi, rasa aman ini baru sebatas rasa aman dari konflik bersenjata. Masyarakat belum merasakan hadirnya kebebasan dan keadilan.

"Di daerah-daerah yang pernah menjadi basis GAM (Gerakan Aceh Merdeka), masih ada kekhawatiran untuk bicara tentang politik. Masyarakat juga masih merasa takut untuk ikut berorganisasi. Ada ketakutan ditangkap aparat keamanan," kata Anies.

Selanjutnya, papar Anies, dari survei itu diperoleh adanya 38 persen responden yang mewakili seluruh masyarakat di Aceh masih merasa takut bicara politik. Sementara, di kabupaten bekas basis GAM, angka ketakutan lebih tinggi yakni 48 persen.

Kemudian, separuh masyarakat (50 persen) Aceh masih merasa takut terhadap penangkapan semena-mena oleh aparat. Lagi-lagi, angka ketakutan ini lebih tinggi terjadi di kabupaten bekas basis GAM yakni 59 persen. "Ini bisa jadi karena trauma-trauma masa lalu," kata Anies.

Problem utama yang saat ini dihadapi masyarakat NAD, jelas Anies, adalah ekonomi. Buktinya, hanya 22 persen masyarakat NAD yang menyatakan kondisi NAD baik atau sangat baik.

Di daerah pedesaan maupun perkotaan, terkait hal tersebut di atas, masyarakat mengeluh soal kondisi ekonomi. Bahkan, hampir separuh penduduk NAD (40 persen) menyatakan kondisi ekonomi buruk atau sangat buruk.

Menjawab pertanyaan menurut masyarakat apa masalah penting di NAD, 43 persen mengatakan harga-harga kebutuhan pokok mahal. Lalu, 33 persen mengatakan susah mencari lapangan pekerjaan.

Selain kedua hal itu, hukum, keamanan, transportasi, pendidikan, dan kepemimpinan juga dianggap masalah penting oleh masyarakat NAD. Tapi, angka jawabannya hanya berada di bawah 5 persen.

Lebih lanjut, menanggapi survei ini, dua anggota DPR Ferry Mursyidan Baldan dan Farhan Hamid, dalam kesempatan tersebut, berpendapat kesulitan ekonomi yang dihadapi masyarakat Aceh adalah masalah umum yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Ferry yang juga Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (RUU PA) berpendapat situasi ekonomi di Indonesia secara faktual saat ini memang kurang baik. Maka dari itulah, menurutnya, masalah ekonomi di NAD sulit dijadikan ukuran persoalan utama kini.

Di samping itu, Farhan Hamid mengatakan apresiasi masyarakat NAD terhadap perdamaian harus disambut positif. Penandatanganan nota kesepahaman Helsinki pun harus segera direalisasikan secara yuridis dalam bentuk RUU PA.

**Penulis:** Prim

**Berita Lain:**

28/03/2006, 11:32 wib

- [Menko Polhukam Temui Sejumlah Pejabat Papua](#)

28/03/2006, 10:50 wib

- [RUU Keimigrasian AS Mungkin Berdampak bagi TKI](#)

28/03/2006, 10:32 wib

- [Oknum Polisi Disebut sebagai Pelaku Penembakan di Poso](#)

---

Find out more on  
**www.kcm.co.id**

---

**BACA HARI INI**

Agenda Acara - Televisi - Bentara Budaya - Kata Mutiara

**[Saham & Pasar Uang](#) - [Hiburan](#) - [Kesehatan](#) - [Nasional](#) - [Metropolitan](#) - [Olah Raga](#) - [Sains & Teknologi](#)**

**KOMUNITAS:** [Berita Duka](#) - [Feng Shui](#) - [Horoskop](#) - [Iklan Mini](#) - [Karier](#) - [Kata Mutiara](#) - [Kontak Jodoh](#) - [News By Email](#) - [Pasar Property](#) - [Seremonia](#) - [Surat Pembaca](#) - [Toko Buku](#) **KOLOM:** [Sarapan Pagi](#) - [Features](#) - [Berita Foto](#)

---

Dapatkan berita KCM melalui: SMS - WAP/GPRS

Tampilan terbaik dengan browser  
Design By KCM Copyright @ PT. Kon

DIGITAL LIFE  
**detikcom**

0 807 1 807 807  
JAKART 10261 2006  
KEMENTERIAN KOMUNIKASI

Bayar Tiket Online\*, bawa pulang 15 notebook  
setiap bulan & Grand Prize sebuah MPV

\*ATM, Credit Card, Phone Banking, Internet Banking

Periode 1 Januari - 31 Maret 2006

**Garuda Indon**

**Behind their professional performance**



detikNews | detikFinance | detikFood | detikHot | detiki-Net | detikSport | Foto | Indeks

Info Iklan : SMSiklan | Sepakbola | Ticket Box | newsUpdate | detikShop | Surat dari Buncit

:: Lifestyle | Cupid | Jodoh | 123 X-Fun | Iguana | boleh | mobile tren | fun dering | makan yoo ::

SELEMBUT AIR MATA



**INSTO  
MOIST**

Melembabkan  
mata kering  
akibat lama di  
depan komputer



**HALO BCA**

Ingin nonton F1 di Inggris langsung...  
untuk 5 orang pemenang...  
BCA

## 6 Dari 10 Warga Aceh Yakin GAM Tetap Inginkan Merdeka

Nurfajri Budi Nugroho - detikcom

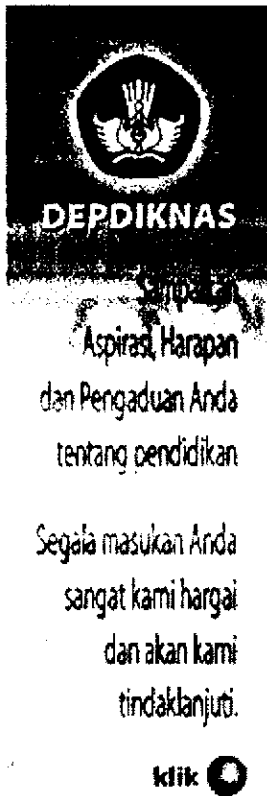
**Jakarta** - Meski telah damai, ternyata banyak warga Aceh yang tidak percaya Gerakan Aceh Merdeka (GAM) akan berhenti memperjuangkan kemerdekaan agar lepas dari Indonesia.

Demikian hasil penelitian Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang disampaikan peneliti senior LSI Anis Baswedan dalam jumpa pers, di Hotel Sari Pan Pacific, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Selasa (28/3/2006).

LSI melakukan penelitian pada 8-18 Maret terhadap 1.015 responden yang dilaksanakan di seluruh daerah di Aceh. Penelitian dilakukan untuk mengetahui perkembangan Aceh 6 bulan pasca MoU Helsinki.

Hasil penelitian diketahui, 7 dari 10 masyarakat Aceh mengatakan ada kemajuan perdamaian antara GAM dengan



**detikNews**

26/03/2006 18:05 WIB  
 Puting Belung  
 Perandangan Politik  
 Rokok Linting Sidoarjo

**detikNews**

28/03/2006 18:00 WIB  
 Polri Periksa Direktur  
 PJB PLN 29 Maret

**detikNews**

26/03/2006 17:47 WIB  
 RUU APP Bakal Jadi  
 Kendaraan Politik Pemilu  
 2009

**detikNews**

28/03/2006 17:25 WIB  
 Guru Nurtaila Bebas dari  
 Dakwaan

**detikNews**

28/03/2006 17:21 WIB  
 3 Warga Papua yang  
 Menyeberang ke PNG  
 Bukan Mahasiswa

pemerintah pasca MoU. Namun 6 dari 10 masyarakat Aceh masih yakin GAM akan tetap memperjuangkan kemerdekaannya.

"Meski mereka merasakan perdamaian, namun tak semuanya yakin GAM tidak lagi ingin merdeka," kata Anis.

Ketidakpercayaan kepada GAM tampak makin jelas ketika dilakukan analisa berdasarkan wilayah. Di wilayah bekas GAM, tercatat hanya 4 dari 10 orang Aceh di wilayah itu yang menyatakan yakin perjuangan GAM untuk memisahkan diri dari NKRI telah berakhir.

Dalam survei tersebut juga ditemukan 85 persen warga Aceh menyatakan pemerintah telah berhasil mendamaikan GAM dengan warga Aceh lainnya. Sementara lebih dari 77 persen menilai baik kinerja pemerintah dalam menindaklanjuti MoU Helsinki. "Ini harus diapresiasi," tandas Anis.

LSI juga menemukan masih adanya ketakutan di masyarakat untuk mengekspresikan aspirasi politik secara langsung. Hal tersebut disebabkan oleh pengalaman intimidasi, baik dari pemerintah RI maupun GAM selama ini.

"Hanya 53 persen yang merasa bebas mengartikulasi aspirasinya, banyak dari mereka yang masih ragu perdamaian akan menghasilkan kebebasan menyampaikan pendapat," terang peneliti LSI itu.

Pandangan tentang kebebasan berpolitik terlihat sangat berbeda antara wilayah yang pernah jadi basis GAM dan yang bukan. Masyarakat di wilayah basis GAM masih dihantui rasa takut untuk ikut berorganisasi dan takut ada penangkapan semena-mena oleh aparat. (iy)

**Baca juga:**

- Rumah Anti Cemburu untuk Aceh
- Eks TNA:  
Groggi Senjata Diganti Pulpen
- Bakhtiar Abdullah, Jubir GAM yang Belum Berminat Jadi WNI
- Melongok 'Sarang' GAM Nan Megah

Informasi pemasangan webtorial/iklan  
 Hubungi bagian Iklan di infoiklan@staff.detik.com  
 Telepon 021-7941177 ext.526

**SMS Iklan**

Dijual 10ruko baru, di Plumpang Raya, Jakut. Lt/Lb 120/204, HGB. 3 lantai, parkir luas, Lks ramai & strategis. www.rukoplumpang.cjb.net - Ridwan (622170188817)

Like    Cara

# tempointeraktif™

be the first, but not get the truth

Search

find

| Advance search

| Registration

| Help

|

Home  
Nasional  
Ekonomi&Bisnis  
Nusa  
Jakarta  
Indikator  
Infografis  
Majalah  
Koran  
Pusat Data  
Tempophoto  
English  
Japanese



## Mayoritas Masyarakat Aceh Dambakan Partai Lokal

Selasa, 28 Maret 2006 | 14:55 WIB

**TEMPO Interaktif, Jakarta:** Hasil penelitian Lembaga Survei Indonesia di Aceh dari 8 hingga 18 Maret lalu mengungkapkan bahwa mayoritas masyarakat di sana mendambakan berdirinya partai lokal.

"Dari 77 persen suku Aceh yang disurvei, 67 persen di antaranya menyatakan bahwa mereka setuju dan sangat setuju adanya partai lokal di sana," ujar Peneliti Utama Lembaga Survei Indonesia Anies Baswedan dalam acara jumpa pers "Perdamaian dan Politik Lokal di Nanggroe Aceh Darussalam" di Jakarta hari ini.

Dalam konteks pemilihan kepala daerah, 64 persen responden menyatakan setuju adanya calon independen untuk gubernur, bupati, dan walikota. "Sebanyak 57 persen pernah mendengar kalau pemilihan kepala daerah nanti akan dilakukan secara langsung," papar Anies.

Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Aceh Ferry Mursyidan Baldan, yang hadir sebagai salah seorang pembicara dalam acara itu, mengatakan data itu merepresentasikan harapan akan masa depan politik di wilayah yang pernah di tetapkan sebagai daerah operasi militer tersebut. "Partai politik lokal dianggap sebagai instrumen membangun harapan politik masa depan," ujarnya

Ferry tidak melihat permintaan untuk dilegalkannya keberadaan partai politik lokal sebagai salah upaya pengeksklusifan daerah Aceh. "Ini merupakan kebutuhan lokal masyarakat di sana," ujar politisi Partai Golkar itu.

Raden Rachmadi

### INDEKS BERITA LAINNYA :

Pilih

Go

dibuat oleh Radja:

### Berita Terkait

- Ulama Aceh Minta Lirt RUU PPA
- RUU Aceh Disahkan A
- RUU Aceh Tetap Dibat Reses
- PDIP Tetap Tolak Nota

- Pansus Belum Pastika RUU Aceh
  - DPR Soroti Isu Tata N RUU Aceh
  - Pakar: RUU Aceh Jang HAM
  - Pansus Aceh Akan Der DPRD dan Pemda
  - Tiga Menteri Jelaskan Pemerintahan Aceh
  - Pemerintah Dinilai Tid Memberikan Otonomi
- > selengkapnya...

### Komentar Anda

- Kirim
- Baca [1]
- Via SMS

Anda bisa mengc  
berita ini melalui  
**TIJAWAB** [spasi  
[spasi] **komenta**  
ke **9333**

### Berita Utama

- Lockoneko Mundur Da Asian Games
- Guru Nurlaila Bebas
- Presiden Tegur Pemda Konsumtif
- Blair Akan Bertemu Er Islam
- Operasi Mengelupas K Berjalan Lancar

<< **March, 2006**

M	Sn	Si	R
			01
05	06	07	08
12	13	14	15
19	20	21	22
26	27	28	29



You are here: Homepage &gt; Newsdesk &gt; Half of Acehnese still fear security arrest-survey

**HOME**

Newsdesk

NGO Latest

**EMERGENCIES**

Africa

Americas

Asia

Europe

Middle East

**COUNTRY PROFILES**

Select a country ▾

**TOPICS**

Select a topic ▾

**IMAGES**

Reuters Pictures

Pictures Galleries

Satellite Images

Interactive Map

**RESOURCES**

NGO Directory

Training

Jobs

In the press

**NGO SERVICES**

Alerting

**AlertNet Challenge**

Take the quiz...

**GO** →**Tsunami AidWatch****Global Pledge-o-meter**

## Half of Acehnese still fear security arrest-survey

28 Mar 2006 08:15:43 GMT

Source: Reuters

**Background**

► **CRISIS PROFILE:** Aceh peace is ray of light after tsunami

**MORE** →

in August has so far held without major incidents.

Indonesia and the separatist Free Aceh Movement (GAM) agreed to end almost 30 years of war through a Finnish-mediated deal that prompted GAM to drop its fight for independence and Jakarta to allow rebels to participate in future elections in Aceh, located on the northern tip of Sumatra island.

But a survey of more than 1,000 respondents living in the province showed that while 76 percent thought security in Aceh was good, half said they still often fear policemen and soldiers would apprehend them without clear reason, a practice common in the conflict period.

Almost half the respondents who live in former rebel strongholds said they were afraid to talk about politics.

"Residents in GAM areas are still haunted by fear of involvement in an organisation or facing unjust arrests by the security apparatus," the Indonesian Survey Institute (LSI), the country's leading pollster, said in a statement.

"To strengthen the belief that this peace can last, concrete evidence like the protection of political freedom and from fear, especially in former areas where GAM was based, is needed."

The Indonesian parliament is debating a bill that will regulate the first direct gubernatorial election in Aceh, expected in mid 2006.

One sticking point is whether to insert articles allowing independent nominees to run before local parties, including GAM's political vehicle, are set up next year.

The survey showed 64 percent of Acehnese agreed to the idea of having independent candidates with 16 percent rejecting it.

JAKARTA, March 28 (Reuters) - Half the people in Indonesia's Aceh province still fear they will be unjustly arrested by security forces, a survey showed on Tuesday, although a truce signed

**Emergencies at**

- Aceh uprising
- Reuters Tsunami

**Countries****RESET**

- Indonesia profil
- View Djakarta



GAM and Indonesia signed the peace deal after months of negotiations in Helsinki spurred by the December 2004 tsunami that left around 170,000 Acehese dead or missing.

AlertNet news is provided by **REUTERS**

[GO](#)

[Newsdesk](#) [NGO Latest](#) [Reuters Pictures](#)

In the press

Deterioration in Nigeria.  
Kenya's drought and why  
camels are handy in a  
famine

[GO](#)

- Half of Acehese still fear security arrest-survey (2 minutes ago)  
**Source: Reuters**
- Philippines' Arroyo calls for passage of terror law (45 minutes ago)  
**Source: Reuters**
- Scenic Indonesia island marks devastating quake (1 hour ago)  
**Source: Reuters**
- FACTBOX-Soaring numbers affected by disasters (15 hours ago)  
**Source: Reuters**
- Year on scenic Indonesia island still reels from quake (20 hours ago)  
**Source: Reuters**

[MORE](#)

[LOW GRAPHICS](#)


[GET WEEKLY EMAIL](#)

[ALERTING](#)

Weekly appeal

**WER - Forgotten people of  
Northern Uganda bear  
brunt of regional drought**

[Printable view](#) | [Email this article](#) | [Send comments](#)

Powered by  **Sun**  
Microsystems

[Disclaimers](#) | [Copyright](#) | [Privacy](#) | [Contact us](#) | [Feedback](#) | [About us](#) | [RSS](#) [XML](#)

Last updated: Tue 14